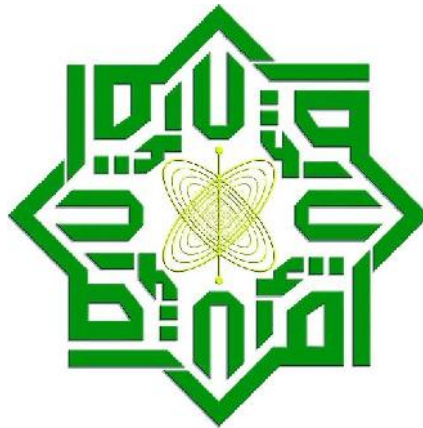


# **SKRIPSI**

## **ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAERAH KABUPATEN NATUNA**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Oleh :

**IMAM MAZLI**  
**NIM. 10875004532**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU  
RIAU  
2012**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAERAH KABUPATEN NATUNA**

Oleh :

**IMAM MAZLI**  
**NIM. 10875004532**

*Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah implementasi kebijakan pengembangan objek wisata daerah Kabupaten Natuna ? dan Mengapa implementasi kebijakan pengembangan objek wisata daerah Kabupaten Natuna belum optimal dan bagaimana solusinya ?. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengembangan objek wisata daerah di Kabupaten Natuna. Dan Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Natuna dan solusi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, queisioner, dan wawancara. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu suatu teknik analisa data dengan cara menggambarkan fenomena keadaan yang ditemui dilapangan. Dengan metode ini penulis memaparkan dan menguraikan kata-kata yang didapat, dimana selanjutnya penulis menganalisa dan menginterpretasikan data dan dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini, kebijakan pengembangan objek wisata daerah dilihat dari proses pelaksana program, kepentingan yang terpengaruhi, manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang dicapai, dan sumber daya yang digunakan. dari hasil pengukuran terhadap masing-masing sub indikator penelitian yang dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa kebijakan pengembangan objek wisata daerah Kabupaten Natuna terlaksana dalam kategori cukup baik.*

**Kata kunci : Kebijakan Pengembangan Objek Wisata, Natuna**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. skripsi ini berjudul **“ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAERAH KABUPATEN NATUNA”** diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian Munaqasah pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, tentunya dengan maksud guna penyempurnaan skripsi ini. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Drs. Almasri, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Bapak Rusdi S.Sos selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Mahmuzar, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing penulis guna penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kedua orang tua penulis; Bapak Misiran dan Ibunda Supini, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta dukungan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Mudah-mudahan perjuangan bapak dan ibu mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T.
6. Pihak instansi-instansi yang terkait dalam pembuatan skripsi ini terutama Dinas Pariwisata Kab. Natuna yang di kepalai oleh Bapak. Drs. Syamsul Hilal, Selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, dan para pegawai banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Buat teman-teman seperjuangan penulis, terutama Lokal C angkatan 2008 Jurusan Adm. Negara yang banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, serta buat semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, *you're all my best friend*.

Akhirnya atas segala bantuan semua pihak, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Pekanbaru, 28 Juni 2012**  
**Penulis**

**IMAM MAZLI**  
**10875004532**

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PERSEMBAHAN**  
**ABSTRAK**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>

**BAB I    PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	16
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
1.5. Sistematika Penulisan.....	16

**BAB II    TELAAH PUSTAKA**

2.1. Kerangka Teori .....	19
2.2. Definisi Konsep .....	32
2.3. Konsep Operasional.....	33
2.4 Teknik Pengukuran.....	34
2.5 Hipotesis .....	35

**BAB III    METODOLOGI PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian .....	36
3.2. Waktu dan Jenis Penelitian.....	36
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	36
3.4. Populasi dan Sampel.....	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.6. Analisa Data .....	39

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

4.1. Sejarah Kabupaten Natuna .....	40
4.2. Geografi .....	40
4.3. Demografi .....	42
4.4. Sosial Budaya dan Pendidikan .....	43
4.5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata .....	49
4.6. Visi dan Misi Dinas Pariwisata .....	60
4.7. Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna.....	61

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1. Identitas Responden .....	65
a. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
b. Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Umur ....	66
c. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.	66
d. Identitas Responden Berdasarkan Lama Bertugas atau bekerja .....	67
5.2. Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Daerah Kabupaten Natuna .....	68
a. Kebijakan Pengembangan Aksesibilitas dan Infrastruktur.....	71
b. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya dan Peningkatan Kelembagaan .....	82
c. Kebijakan Pengembangan Pemasaran dan Promosi.....	92
d. Kebijakan Pengembangan Produk Wisata .....	100

#### **BAB VI PENUTUP**

6.1. Kesimpulan.....	111
6.2. Saran .....	114

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BIOGRAFI PENULIS**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Potensi Objek Wisata Ditinjau Pada Setiap Kecamatan Di Kabupaten Natuna .....	9
<b>Tabel 1.2</b>	Potensi Wisata Budaya, Permainan Rakyat Dan Kerajinan..	10
<b>Tabel 1.3</b>	Alokasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna.....	11
<b>Tabel 1.4</b>	Potensi Pariwisata Yang Sudah Dikembangkan Dan Dikelola Oleh Pemerintah Kabupaten Natuna .....	12
<b>Tabel 1.5</b>	Transportasi .....	14
<b>Tabel 3.1</b>	Jumlah Responden.....	38
<b>Tabel 4.1</b>	Jumlah Penduduk.....	43
<b>Tabel 4.2</b>	Rasio Murid Sekolah Kabupaten Natuna 2011 .....	44
<b>Tabel 5.1</b>	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	65
<b>Tabel 5.2</b>	Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Umur .....	66
<b>Tabel 5.3</b>	Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	66
<b>Tabel 5.4</b>	Identitas Responden Berdasarkan Lama bertugas .....	67
<b>Tabel 5.5</b>	Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana Program dalam Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur .....	72
<b>Tabel 5.6</b>	Tanggapan Responden Mengenai Kepentingan Yang Terpengaruhi Dalam Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur .....	74
<b>Tabel 5.7</b>	Tanggapan Responden Mengenai Manfaat Yang Dihasilkan Dalam Peningkatan Aksesibilitas Dan Infrastruktur .....	76
<b>Tabel 5.8</b>	Tanggapan Responden Mengenai Derajat Perubahan Yang Di Inginkan Dalam Peningkatan Aksesibilitas Dan Infrastruktur .....	78
<b>Tabel 5.9</b>	Tanggapan Responden Mengenai Sumber Daya Yang Digunakan Dalam Peningkatan Aksesibilitas Dan Infrastruktur .....	79
<b>Tabel 5.10</b>	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kebijakan Pengembangan Aksesibilitas Dan Infrastruktur .....	81
<b>Tabel 5.11</b>	Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana Program Dalam Peningkatan Sumber Daya Dan Kelembagaan .....	84
<b>Tabel 5.12</b>	Tanggapan Responden Kepentingan Yang Di Pengaruhi Dalam Peningkatan Sumber Daya Dan Kelembagaan .....	85

<b>Tabel 5.13</b>	Tanggapan Responden Mengenai Manfaat Yang Dihasilkan Dalam Peningkatan Sumber Daya Dan Kelembagaan .....	87
<b>Tabel 5.14</b>	Tanggapan Responden Mengenai Derajat Perubahan Yang Di Inginkan Dalam Peningkatan Sumber Daya Dan Kelembagaan .....	89
<b>Tabel 5.15</b>	Tanggapan Responden Mengenai Sumber Daya Yang Digunakan Dalam Peningkatan Sumber Daya Dan Kelembagaan .....	90
<b>Tabel 5.16</b>	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kebijakan Pengembangan Sumber Daya dan Peningkatan Kelembagaan .....	91
<b>Tabel 5.17</b>	Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana Program Dalam Kegiatan Pengembangan Pemasaran Dan Promosi .	93
<b>Tabel 5.18</b>	Tanggapan Responden Kepentingan Yang Di Pengaruhi Dalam Kegiatan Pengembangan Pemasaran Dan Promosi .	94
<b>Tabel 5.19</b>	Tanggapan Responden Mengenai Manfaat Yang Dihasilkan Dalam Kegiatan Pengembangan Pemasaran Dan Promosi .....	96
<b>Tabel 5.20</b>	Tanggapan Responden Mengenai Derajat Perubahan Yang Di Inginkan Dalam Kegiatan Pengembangan Pemasaran Dan Promosi .....	97
<b>Tabel 5.21</b>	Tanggapan Responden Mengenai Sumber Daya Yang Digunakan Dalam Kegiatan Pengembangan Pemasaran Dan Promosi .....	98
<b>Tabel 5.22</b>	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kebijakan Pemasaran Dan Promosi .....	100
<b>Tabel 5.23</b>	Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana Program Dalam Pengembangan Produk Wisata .....	101
<b>Tabel 5.24</b>	Tanggapan Responden Kepentingan Yang Di Pengaruhi Dalam Pengembangan Produk Wisata .....	103
<b>Tabel 5.25</b>	Tanggapan Responden Mengenai Manfaat Yang Dihasilkan Pengembangan Produk Wisata.....	104
<b>Tabel 5.26</b>	Tanggapan Responden Mengenai Derajat Perubahan Yang DiInginkan dalam Pengembangan Produk Wisata .....	106
<b>Tabel 5.27</b>	Tanggapan Responden Mengenai Sumber Daya Yang Digunakan Dalam Pengembangan Produk Wisata.....	107
<b>Tabel 5.28</b>	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kebijakan Pengembangan Produk Wisata .....	108



<b>Tabel 5.29</b>	Rekapitulasi Jumlah Rata-Rata Tanggapan Responden Tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Yang Dilakukan Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna .....	109
-------------------	--	-----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia memiliki potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia merupakan negara berkembang, tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah perwujudan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Dapat berupaya melakukan penyesuaian terhadap kemajuan dan perkembangan dunia yang mengarah kepada arus globalisasi yang semakin canggih, sebagai pemerintah terutama mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan disegala aspek.

Negara Republik Indonesia yang sangat luas, dengan banyaknya pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh penjuru tanah air yang terpisahkan oleh lautan luas, begitu pula dengan keanekaragaman budaya penduduknya serta keindahan alamnya merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan pariwisata, dengan berlakunya undang – undang otonomi daerah yakni undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah berhak

dan diwajibkan untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerahnya masing-masing.

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dianggap penting sebagai langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, karena pendapatan negara tidak mungkin selamanya dari sektor migas, hal ini dikarenakan migas lama kelamaan akan habis akibat pemakaian yang terus menerus, tetapi dari sektor non migas ini seperti pariwisata ini juga dapat membantunya terutama sekarang ini masyarakat sangatlah berat dengan beban hidup seperti dengan adanya kebijakan pemerintah dengan kenaikan harga BBM, pengangguran, dan masih banyak lagi fenomena-fenomena sosial lainnya.

Komponen utama dalam aktivitas pariwisata adalah obyek dan daya tarik wisata. Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, obyek dan daya tarik wisata meliputi keadaan alam, flora, fauna, serta hasil karya manusia. Oleh karena itu, aktivitas pariwisata juga merupakan usaha pemanfaatan berbagai bentuk sumber daya lingkungan, baik yang bersifat fisik biotis maupun budaya. Pada sektor pariwisata ini diharapkan dapat menjadi sebuah tumpuan harapan masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkan pendapatan devisa sebesar-besarnya dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pendapatan Negara dan khususnya Pemerintah Daerah. Usaha-usaha yang lain juga harus dilakukan adalah dengan pengembangan pariwisata ini seperti meningkatkan kualitas kebudayaan bangsa, dengan memperkenalkannya, peninggalan sejarah dan wisata bahari yang mempunyai keindahan alam yang sangat indah, merupakan daya tarik tersendiri yang sangat memukau.

Kabupaten Natuna terbentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Natuna, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno pada tanggal 12 Oktober 1999, dalam acara tersebut juga dilantik pejabat Bupati Natuna Andi Rifai Siregar dengan SK Mendagri No. 131. 24. 1129 tertanggal 8 Oktober 1999. Hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Midai, Jemaja, Siantan, Serasan. Pulau Natuna terletak 600 Km sebelah timur laut Singapura dan 1100 Km sebelah utara Jakarta. Kabupaten Natuna adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Kepulauan Riau. Posisi Natuna terletak paling utara Indonesia. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau, dan Kabupaten Bintan, sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Malaysia Timur (Serawak) dan Kalimantan Barat. Natuna berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan.

Natuna merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak potensi, baik itu potensi Migas, Perikanan, Perkebunan, dan keindahan lainnya. Selain panorama dan keindahan alam yang sangat bagus, memiliki beragam kebudayaan dan kesenian yang perlu mendapat pelestarian dan juga pengembangan. Natuna salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki ratusan gugusan pulau-pulau yang terangkai bagaikan untaian mutiara. Dengan luas wilayahnya 3.235,18 km<sup>2</sup>, Natuna berada dilokasi yang sangat strategis sebagai daerah investasi maupun pariwisata, yaitu berada dikawasan laut cina dan berbatasan langsung dengan Malaysia, Thailand, dan Kalimantan. Gugusan

berbatuan granit yang mempunyai karakteristik alur vertikal, semakin menambah pesona Natuna sebagai kawasan wisata bahari. Untuk kekayaan wisata bawah laut Natuna memiliki kekayaan alam yang sangat beragam yang menarik dan sangat cocok untuk wisata Diving dan Snorkeling. Selain wisata pantai, wisatawan akan disuguhkan beragam pilihan pesona alam natuna.

Sumberdaya hayati laut dan lingkungan sekitarnya yang memiliki daya tarik dalam estetika, keunikan dan nilai-nilai sejarah, dapat merangsang minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Natuna. Beberapa wilayah di Kabupaten Natuna memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebagai objek wisata berbasis sumberdaya hayati dan khazanah bahari, seperti panorama pantai, keunikan lingkungan laut, kekhasan biota laut dan fenomena-fenomena laut lainnya. Untuk melakukan pengembangan terhadap pariwisata daerah Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna mengacu kepada pada Undang-undang Republik Indonesia Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan. Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan kegiatan pengembangan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 09 tahun 2011 tentang susunan dan tata kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, salah satunya Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010. Keputusan Bupati Natuna Nomor 103 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara

Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Adapun kebijakan pengembangan sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Natuna, sesuai dengan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2010 tentang RIPPDA sebagai berikut:

a. Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Pariwisata

Pengembangan infrastruktur dimaksudkan untuk memberi fasilitas dan kenyamanan bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Natuna. Peningkatan infrastruktur ini meliputi pembangunan tempat – tempat wisata, akses transportasi telekomunikasi yang memberikan kemudahan yang mendukung wisatawan.

b. Pengembangan Sumber Daya dan Peningkatan Kelembagaan.

Sumber daya merupakan atribut alam yang bersifat netral sampai ada campur tangan manusia dari luar untuk mengubahnya agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia itu. Dalam konteks pariwisata, sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mampu menguasai di bidangnya. Kebijakan kelembagaan di ambil daerah guna membentuk kerja sama antara lembaga maupun organisasi yang bergerak dalam bidang pengembangan dan pengelolaan objek wisata sehingga mempunyai kesamaan visi dan

misi guna menyukkseskan pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Natuna.

c. Pemasaran dan Promosi.

Kebijakan pemasaran dan promosi merupakan hal yang pertama dan utama dalam upaya peningkatan pendapatan (penjualan), karena dengan melalui promosi dan pemasaran inilah pemerintah daerah memberikan informasi kepada wisatawan tentang objek wisata yang ada di Kabupaten Natuna.

d. Pengembangan Produk Wisata

Kebijakan pengembangan produk wisata diharapkan mampu menjadikan potensi yang ada menjadi potensi unggulan dan juga dapat mengangkat prospek pengembangan bagi wisata yang belum dikembangkan.

Kondisi pariwisata Kabupaten Natuna sebelum dilakukan pengembangan oleh Dinas Pariwisata terlihat kurang menarik, hal ini penulis lihat pada tahun 2008 dan 2009 pariwisata Kabupaten Natuna belum mengalami pengembangan secara menyeluruh. Aksesibilitas dan infrastruktur yang belum memadai, kurangnya kegiatan pengembangan sumber daya dan kelembagaan seperti pelatihan dan pendidikan, kegiatan pemasaran dan promosi yang hanya setingkat lokal, dan tidak adanya pengembangan produk wisata unggulan Kabupaten Natuna. Namun setelah dikeluarkannya kebijakan pengembangan pariwisata, keadaan pariwisata Natuna sedikit banyak mengalami perubahan meskipun belum signifikan hasilnya, akan tetapi pemerintah telah berupaya melakukan kegiatan

pembenahan pariwisata. Dapat kita lihat dengan pembangunan sarana dan prasarana di beberapa objek wisata, promosi ke tingkat nasional melalui kegiatan parade tari dan pameran budaya, kegiatan pendidikan dan pelatihan, dan juga pengembangan wisata unggulan seperti wisata bahari.

Adapun kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata ialah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tempat wisata di antaranya kegiatan pengembangan jalan menuju tempat wisata, penyediaan Gazebo, kios, wahana permainan, sarana olahraga dan sarana penunjang lainnya kemudian kegiatan pengembangan promosi dan pemasaran diantaranya dengan memasang iklan di media elektronik dan juga media cetak, pamflet, booklet, dan dengan mengikuti kegiatan parade kesenian dan kebudayaan di tingkat nasional maupun daerah, kemudian kegiatan pengembangan sumber daya dan kelembagaan kegiatan yang dilakukan adalah memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat di tempat – tempat sekitar objek wisata yakni dengan pelatihan wirausaha, pemandu wisata, pelatihan fotografi, scuba diving dan snorkling. Kegiatan pengembangan yang selanjutnya ialah dengan mengembangkan potensi wisata unggulan dengan meningkatkan kualitas produk wisata.

Tujuan dari kegiatan pengembangan adalah sebagai upaya dan kegiatan secara sistematis yang dilaksanakan oleh daerah guna pemanfaatan potensi daerah secara optimal serta pelestarian nilai budaya dan peningkatan ekonomi kerakyatan daerah dan tujuan dari RIPPDA agar dapat menjadi arah pengembangan pariwisata dan menjadi pedoman utama bagi stakeholder pariwisata Kabupaten



Natuna termasuk pemerintah Provinsi yang mengakomodasi setiap isu-isu yang berkembang secara sinergi.

Adapun potensi pariwisata yang dikembangkan di Kabupaten Natuna adalah semua potensi wisata Kabupaten Natuna baik itu potensi wisata alam, wisata budaya dan juga potensi – potensi wisata yang memiliki nilai khas Natuna seperti wisata kuliner termasuk juga potensi hutan Natuna yang dapat dijadikan wisata berburu dan lain sebagainya. Akan tetapi nilai-nilai keagamaan jangan pernah ditinggalkan agar dapat menjadi filter bagi pengaruh negatif modernisasi dan globalisasi. Rasa aman yang ditimbulkan dari situasi yang kondusif juga menjadi salah satu faktor pendukung maju dan berkembangnya dunia wisata di suatu daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas, Pemerintah Kabupaten Natuna berusaha keras untuk menata dan mengelola aspek-aspek yang berhubungan dengan sumber daya yang mempunyai potensi pada sektor pariwisata terutama keindahan alam, hal ini merupakan modal dasar yang logis untuk diandalkan dan dikembangkan menjadi pusat pariwisata. Untuk mengetahui tentang potensi wisata yang ada di Kabupaten Natuna, dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Potensi Objek Wisata Ditinjau Pada Setiap Kecamatan**  
**Di Kabupaten Natuna**

No	Lokasi Kecamatan	Objek Wisata
1	Bunguran Timur	Pantai kencana, Batu sindu, Masjid agung, Keramat binja, Gunung ranai, Air terjun, Pulau senoa, Senubing, Batu Kapal
2	Bunguran Timur Laut	Pantai tanjung, Air terjun ceruk, Pulau kambing, Pulau sahi, Sungai sengiap.
3	Bunguran Barat	Pantai pasir semarus, Terumbu karang neneh, Sebunta, Semapi, Gunung sintu, Gunung bending
4	Bunguran Tengah	Bendungan tapau, Air terjun Batu sisir, Bukit berangin, Pantai batu kasah, Pian padang
5	Midai	Gunung air bini, gunung amerika, dan Gunung belampu. Pantai jambat laut, Pantai tanjung kapal, Pantai Tanjung Harapan.
6	Serasan	Pantai pasir sisi, Pantai serem, Air terjun temurun, Terumbu karang pulau bugin.
7	Pulau Laut	Pantai air payang, Pulau sekatung, Karang Panjang.
8	Pulau Tiga	Pulau setanau, Sepanco (kuburan keramat), Terumbu karang goa setekol.
9	Bunguran Utara	Teluk Buton, Pantai pian tujuh, Teluk Pelading, Pantai pasir panjang.
10	Bunguran Selatan	Pantai Setengar, Telaga tujuh, Pantai Cemaga, Pantai batu bayan, Teluk panglima
11	Kecamatan Subi	Danau Air Hijau, Karang Rakit, Pantai Pian Gudang, Goa Kalelawar, Danau P Lintang.

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna (Tahun 2011)

Dari tabel di atas kita dapat mengetahui sebagian kecil potensi wisata yang terdapat di kabupaten Natuna. Namun masih banyak lagi potensi – potensi wisata lainnya yang belum terekspose oleh pemerintah. Selain itu, Kabupaten Natuna juga memiliki berbagai wisata budaya daerah, permainan rakyat tradisional dan kerajinan tangan yang bermacam – macam yang diharapkan mampu untuk menjadi daya tarik peluang investasi dan kunjungan wisatawan. Untuk mengetahui potensi tersebut dapat dilihat tabel 1.2 di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Potensi Wisata Budaya, Permainan Rakyat, Dan Kerajinan**  
**Di Kabupaten Natuna**

No	Potensi wisata	Objek wisata
1	Kesenian Tradisional	Tari zapin, Hadrah, Awan mendung, Mendu, Berzanji, Silat, Ratif saman, Tumbuk emping, Gambus, Berendah, bertingkah beduk, bertingkah gendang,
2	Permainan Rakyat	Adu gasing, Loncat batu, Lu lu cina, Gali kayu, Ring kap, Panjat pinang, Lomba perahu kolek
3	Kerajinan	Anyaman tapis, Tikar, Nyiru

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna (Tahun 2011)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Natuna memiliki kekayaan alam dan budaya tradisional yang banyak, yang apabila dikelola secara maksimal dapat menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara sehingga mampu menghasilkan pendapatan daerah yang cukup besar. Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan dalam memaksimalkan potensi kekayaan alam yang terdapat di Kabupaten Natuna, melalui Dinas Pariwisata, dengan berbagai upaya yang dilakukan melalui pembenahan, penataan objek wisata, penyediaan transportasi serta promosi-promosi dilakukan guna meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun global.

Untuk mendukung kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) Kabupaten Natuna, hal ini dimaksudkan agar program kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dapat terlaksana semaksimal mungkin. Berikut ini alokasi dana per tahun Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini :

**Tabel 1.3**  
**Alokasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna**

No	Tahun	Jumlah anggaran	Realisasi anggaran	Persentase
1	2007	Rp.3.740.121.900	Rp.2.796.306.237	74,8%
2	2008	Rp.2.936.108.500	Rp.1.189.498.410	40,5%
3	2009	Rp.1.060.000.000	Rp.1.031.209.800	97,3%

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna (Tahun 2011)

Dari tabel di atas dapat dilihat besarnya anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna yang digunakan untuk melaksanakan program kerja pertahun. Besarnya alokasi dana, tergantung jumlah APBD Kabupaten Natuna pertahun. Untuk tahun 2009, anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna mengalami penurunan dikarenakan realisasi anggaran tahun 2008 tidak mencapai 50%, hal ini dianggap program kerja tahun 2008 tidak berjalan sesuai *schedule*.

Dengan alokasi dana yang ada serta potensi pariwisata yang cukup seharusnya Dinas Pariwisata melakukan upaya pengembangan secara maksimal. Namun dari begitu banyak objek wisata yang ada di Kabupaten Natuna hanya beberapa yang baru dikembangkan serta ditenahi oleh pemerintah. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang potensi pariwisata yang sudah dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Natuna sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan objek wisata daerah No. 158 tahun 2010, dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini :

**Tabel 1.4**  
**Potensi Pariwisata Yang Sudah Dikembangkan Dan Dikelola**  
**Oleh Pemerintah Kabupaten Natuna**

No.	Nama Objek	Lokasi
1.	Pulau Senoa	Kec. Bunguran Timur
2.	Pantai Sengiap	Kec. Bunguran Timur Laut
3.	Pantai Teluk Selahang	Kec. Bunguran Timur Laut
4.	Pantai Teluk Depeh	Kec. Bunguran Selatan
5.	Pantai Teluk Buton	Kec. Bunguran Utara
6.	Pantai Sisi	Kec. Serasan
7.	Pantai Batu Kasah & Cemaga	Kec. Bunguran Selatan
8.	Pulau Kembang	Kec. Bunguran Barat
9.	Batu Senduyung	Kec. Serasan Timur
10.	Batu Catur	Kec. Serasan

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna (Tahun 2011)

Dari tabel diatas dapat diketahui, dari sekian banyak potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Natuna baru sebagian kecil yang telah dikelola. Fenomena ini membuktikan bahwa, Kabupaten Natuna belum melakukan pengembangan secara optimal. Namun Pemerintah memiliki keinginan untuk menggali potensi pendapatan daerah melalui kepariwisataan, disamping itu juga Pemerintah Kabupaten Natuna masih berupaya untuk mendatangkan investor dari luar dalam pengembangan sektor pariwisata dengan cara promosi dan melakukan ivent-ivent bertaraf nasional.

Usaha pengembangan kepariwisataan yang dilakukan untuk menggali seluruh potensi pariwisata yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tentunya membutuhkan dukungan dari setiap manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan yang dilakukan dapat mencapai sasarannya, yaitu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk itu perlu dilakukan pengembangan yang lebih efektif dan efisien, sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Natuna. Dalam hal melakukan pengembangan daerah sudah tentu harus didukung dengan sarana transportasi yang mendukung untuk menuju Kabupaten Natuna, untuk itu pemerintah telah berupaya melakukan pembenahan di bidang sarana transportasi menuju Kabupaten Natuna, dengan cara melakukan kerjasama melalui penanaman modal dengan maskapai penerbangan bahkan membeli Kapal untuk menuju ke Kabupaten Natuna. Hingga sekarang sarana transportasi menuju ke Natuna belum dapat dilakukan setiap hari. Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.5 dibawah ini, rute transportasi menuju ke Kabupaten Natuna.

**Tabel 1.5**  
**Transportasi**

No	Jenis Transportasi	Nama Transportasi	Jadwal	Keterangan
1	Transportasi Laut	KM. Bukit Raya	1 minggu 1 X	Natuna-Pontianak-Tg.Priok-Pontianak-Natuna
			1 minggu 1 X	Natuna-Anambas Kijang-Tg.Priok-Kijang-Anambas-Natuna
		KM. Perintis	Per 11 hari	Tg.pinang-Natuna
2	Transportasi Udara	Sky Air Line	1 Minggu 3X	Pekanbaru-Batam-Natuna
		Lion Air Line	1 Minggu 3X	Pekanbaru-Batam-Natuna
		Avia Air Line	1 Minggu 3X	Pekanbaru-Batam-Natuna
		Trigana Air Line	1 Minggu 2x	Pontianak - Natuna

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna (Tahun 2011)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana transportasi menuju Kabupaten Natuna yang ada sudah cukup memudahkan kunjungan wisatawan bahkan investor untuk datang ke Kabupaten Natuna. Namun masih perlu dikembangkan lebih baik lagi sehingga mudah untuk menuju ke Kabupaten Natuna.

Hingga saat ini Pemerintah Daerah Natuna belum mengembangkan secara optimal potensi alam dan wisata, Pemerintah Daerah untuk saat ini baru melakukan kegiatan pengembangan di beberapa ODTW saja padahal jika dilihat dari banyaknya potensi pariwisata daerah Kabupaten Natuna pemerintah sudah mampu berbuat banyak. Maka dari itu menjadi penting dan harus diperhatikan dan diusahakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan promosi serta membuka kerjasama dengan investor untuk menjadikan Natuna sebagai tujuan Wisata.

Pemerintah Kabupaten Natuna mempunyai peran penting, mengingat pariwisata dalam pembangunan daerah haruslah menitik beratkan pada aspek sosial seperti penciptaan lapangan pekerjaan, aspek kultur budaya, seperti mengangkat nilai-nilai yang sesuai agama dan adat istiadat setempat, dan aspek ekonomi dalam menguntungkan devisa, pajak bagi pemerintah.

Untuk melaksanakan rencana tersebut Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna haruslah melakukan manajemen atau mengatur yang mendorong pada divisi-divisi atau seksi-seksi yang ada untuk melakukan kerja-kerja dalam pengembangan pariwisata daerah, sehingga kekayaan alam yang diberikan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, untuk itu pemerintah Kabupaten Natuna mengupayakan dan menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan produktif untuk tujuan dan hasil yang sangat maksimal perlu adanya dukungan dan kerja sama dari semua pihak yang terkait.

Untuk itu dalam penelitian ini, penulis menginginkan dan untuk mengetahui strategi manajemen dan upaya pengembangan serta kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan objek wisata Kabupaten Natuna. Bertitik tolak pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul:

“ Analisis Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Daerah Kabupaten Natuna “ .

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan dalam penelitian ini adalah :



1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pengembangan objek wisata daerah Kabupaten Natuna ?
2. Kendala – kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pengembangan objek wisata daerah Kabupaten Natuna dan bagaimana solusinya ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan pengembangan objek wisata daerah di Kabupaten Natuna.
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Natuna dan solusi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Memberikan motivasi serta masukan bagi pihak – pihak yang berwenang dalam melaksanakan kebijakan pengembangan objek wisata daerah Kabupaten Natuna, sehingga memberi manfaat kepada masyarakat.
2. Memberikan kontribusi pengetahuan, pemikiran, dan wawasan bagi penulis khususnya dan masyarakat luas umumnya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penelitian ini akan di tuangkan dalam 5 bab yaitu :

## Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu serta formulasi hipotesis.

## Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan beberapa hal diantaranya : Sampel penelitian, Desain penelitian, Variabel penelitian, Metode penelitian, dan pengajuan Hipotesis.

## Bab IV : Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini merupakan bab yang berisikan keberadaan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna, Struktur Organisasi, dan Uraian tugas – tugas sub bagian.

## Bab V : Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian berupa keseluruhan atau sebagian, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan harapan umum atau peneliti. Dalam bab ini juga dipaparkan alasan kesesuaian atau ketidaksesuaian hasil penelitian. Selain itu dalam bab ini dijelaskan dan dibandingkan pula hasil yang diperoleh penelitian sebelumnya.

## Bab VI : Kesimpulan dan Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan penulis, sehingga akan diperoleh kesimpulan akhir dan penelitian dan saran – saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya serta implikasi penelitian.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian dan teori yang di pergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proporsi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. (Singarimbun, 2001 : 47).

##### **A. Pengertian Kebijakan**

Pembangunan nasional tidak terlepas dari pembangunan-pembangunan yang ada di daerah. Pembangunan di daerah merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah yang harus dilaksanakan demi mencapai kesejahteraan masyarakat daerah yang menjadi tujuan dari otonomi daerah. Salah satu sektor yang dapat memberikan manfaat besar bagi pemerintah dan masyarakat adalah sektor pariwisata.

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. (Syafiie,1999:106). Selain itu Thomas R. Dye juga mengatakan bahwa kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*). (Syafiie,1999 : 107).

Menurut Selanjutnya Harold D Lasswell dan Abraham mengatakan kebijakan adalah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang

terarah. (Nugroho, 2004 : 4). David Eston melukiskan kebijakan sebagai pengaruh (*Impact*) dari aktivitas pemerintah. (Nugroho, 2004 : 4)

Selanjutnya menurut Willy N. Dunn. Kebijakan adalah suatu rangkaian pilihan – pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang – bidang yang menyangkut tugas pemerintahan. Seperti pertahanan, keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain – lain.

Dalam pembuatan kebijakan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya menurut Irfan Islamy faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah :

- a. Adanya pengaruh-pengaruh tekanan dari luar.
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar
- e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu (Islamy, 1992 : 25)

Kebijakan yang telah dirumuskan perlu diimplementasikan, sebab implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan, karena tanpa implementasi maka suatu kebijaksanaan yang telah dirumuskan akan sia-sia.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. (Nugroho, 2004 : 158). Menurut *Mazmanian* dan *Sebatier* implementasi kebijakan berarti usaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa

dan kegiatan-kegiatan yang terjadi sesudah suatu problem pengesahan/legislasi kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. (Wahab, 2008;176)

Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. Oleh karen itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri.

Menurut Mirille S. Grindle (Nugroho, 2004 : 174) bahwa berhasil tidaknya implementasi kebijakan sangat ditentukan dua variabel besar, yakni variabel “*content of policy*” (isi kebijakan) dan variabel “*countext of policy*” (lingkungan kebijakan).

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakan.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
  - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
  - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Variabel isi kebijakan mencakup yaitu :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (*interest affected*).
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan (*type of benefit*).
- c. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*).

- d. Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*).
- e. (Siapa) pelaksana program (*program implementers*).
- f. Sumber daya yang dikerahkan (*resources committed*).

Sedangkan variabel lingkungan mencakup :

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik dan lembaga penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tangkap.

Muatan (isi) program dan muatan kebijakan publik itu berpengaruh terhadap hasil akhir (*outcome*) implementasinya. Muatan program atau muatan kebijakan itu menjadi faktor yang berpengaruh karena dampaknya yang nyata atau yang potensial terhadap lingkungan sosial, politik, dan ekonomi tertentu. Oleh sebab itu, penting sekali untuk memperhitungkan konteks atau lingkungan dimana tindakan administrasi itu berlangsung (Wahab, 2008 : 186)

Pada umumnya tugas pokok dari pelaksanaan kebijakan adalah untuk mewujudkan tujuan (*goals*) yang terkandung dalam kebijaksanaan itu. Menurut Grindle ada tiga hal pokok dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu :

- 1. Memerinci tujuan-tujuan yang hendak dicapai.
- 2. Membentuk program-program kegiatan.
- 3. Mengalokasikan dana untuk pembiayaan-pembiayaan,

Selanjutnya menurut James E. Anderson, sebab-sebab setiap anggota masyarakat itu perlu mengetahui dan melakukan kebijakan negara adalah sebagai berikut.

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan dan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu serta melalui prosedur yang benar.
4. Adanya kepentingan pribadi.
5. Adanya hukuman-hukuman tertentu, bila tidak melaksanakan kebijaksanaan.
6. Masalah waktu

## **B. Model Kebijakan**

Dari pendapat yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa model pembuatan perumusan kebijakan yang dipopulerkan oleh Thomas R.Dye, yaitu :

### **1. Model Sistem**

Model sitem ini pertama kali ditemukan oleh David Easton dalam teori sistem politik yang disodorkannya, bahwa kegiatan terdapat serangkaian proses yang saling mempengaruhi. Tekanan dari lingkungan dipandang sebagai masukan (Input), masukan diproses (Converst), dan proses tersebut menghasilkan sebuah kebijakan (Output), selanjutnya umpan balik kelingkungan (Feed Back) dan itulah yang disebut Easton sebagai suatu sistem kebijakan publik.



## 2. Model Elit

Kebijakan elit ini sebagai prefensi dan nilai – nilai teori elit masa yang berkuasa . teori ini lebih membuat rakyat apatis atau miskin akan informasi tentang kebijakan. Elit lebih banyak memiliki kendali dan sering membentuk opini, jika dibandingkan dengan massa membentuk opini elit.

## 3. Model Kelompok

Model kelompok dalam pengambilan kebijakan mengedepankan kebijakan sebagai titik keseimbangan (Equilibrium).Gagasannya dalam kelompok akan menghasilkan kebijakan yang terbaik.

## 4. Model Kelembagaan

Merupakan turunan dari ilmu politik tradisional yang menekankan pada struktur kelembagaan ketimbang proses atau pola perilaku.

## 5. Model Proses

Model ini merupakan salah satu aktivitas politik sehingga memerlukan proses, dan begitu juga halnya dengan kebijakan yang menyertakan rangkaian proses politik.

## 6. Model Rasionalism

Kebijakan rasional dirancang untuk memaksimalkan kebijakan yang harus dipilih membawa manfaat bagi masyarakat. Rasional disini adalah keputusan yang diperhitungkan secara rasionalitasnya.

## 7. Model Inkrementalism

Model ini menekankan pada kelanjutan kebijakan pemerintah masa lalu dengan sedikit mengadakan perubahan.

### **C. Pengertian Analisis Kebijakan**

E.S. Quade dalam Nugroho (2006:57), mengatakan bahwa asal mula analisis kebijakan disebabkan oleh banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Begitu banyak kebijakan yang tidak memecahkan masalah kebijakan, bahkan menambah masalah baru.

*William N. Dunn* (2003:29) memberikan penekanan terhadap analisis kebijakan atau kebijaksanaan sebagai suatu terapan yang menggunakan berbagai metode dan argument untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan yang dimanfaatkan pada tingkat politik untuk memecahkan masalah public. Lebih lanjut dikatakan *Dunn* (2000:23) analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan secara sederhana tentang pekerjaan analisis kegiatan dalam melakukan analisis meliputi pengumpulan data dan fakta, baik secara keseluruhan maupun sampel, mengklasifikasikan, mengkategorikan, membanding-bandingkan, memberikan komentar atau kritik, dan menyimpulkan hal-hal yang telah dideskripsikan dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami orang lain.

Merujuk kepada pendapat di atas, artinya tindakan-tindakan kebijakan tidak akan dapat ditentukan secara tepat tanpa melakukan analisis kebijakan. Dengan demikian analisis kebijakan sangat penting. Alasannya ialah untuk mengetahui apa yang diharapkan dan akibat tak diduga dari sebuah kebijakan.

Analisa kebijakan juga bersifat dinamis yang bisa dilakukan kapan dan di mana saja, selagi proses kebijakan tersebut berada pada kaedah-kaedah yang tidak bertentangan dengan kehendak publik (Nugroho . 2004:83-84).

#### **D. Pendekatan Analisis Kebijakan**

Dari kutipan di atas, ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam analisis kebijakan, yaitu :

##### **1) Pendekatan kelompok**

Pendekatan ini menyatakan bahwa pembuatan kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari perjuangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang diikat oleh tingkah laku dan kepentingan yang sama. Kebijakan pada suatu waktu menurut pandangan ini merupakan equilibrium (keseimbangan) yang dicapai dalam perjuangan kelompok. Pengaruh kelompok ini ditentukan oleh jumlah, kekayaan, kekuatan organisasi, kepemimpinan, akses terhadap para pembuat keputusan dan kohesi dalam kelompok.

##### **2) Pendekatan Proses Fungsional**

Menurut *Harold Lasswell* ada tujuh kategori analisis fungsional yang dapat digunakan sebagai dasar analisis kebijakan, yaitu:

- a. *Integrasi*, bagaimana informasi tentang masalah-masalah kebijakan yang mendapat perhatian para pembuat keputusan-keputusan kebijakan dikumpulkan dan diproses.

- b. *Rekomendasi*, bagaimana rekomendasi-rekomendasi atau alternatif-alternatif untuk mengatasi suatu masalah tertentu dibuat dan dikembangkan.
- c. *Preskripsi*, bagaimana peraturan-peraturan umum dipergunakan atau diterapkan dan oleh siapa saja.
- d. *Permohonan*, Siapa yang menentukan apakah perilaku tertentu bertentangan dengan peraturan-peraturan.
- e. *Aplikasi*, bagaimana undang-undang sebenarnya diterapkan atau diberlakukan.
- f. *Penilaian*, bagaimana pelaksanaan kebijakan, keberhasilan atau kegagalan itu dinilai.
- g. *Terminasi*, bagaimana peraturan-peraturan semula dihentikan atau dilanjutkan dalam bentuk yang berubah atau dimodifikasi.

### 3) Pendekatan Kelembagaan

Hubungan antara kebijakan public dan lembaga-lembaga pemerintah satu keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan di mana yang memegang kendali kebijakan secara sah dan dibuat, ditentukan, dan diterapkan oleh pemerintah.

### 4) Pendekatan Peran Serta Warga Negara

Pendekatan ini ditekankan kepada keikutsertaan warga Negara untuk terlibat dalam kehidupan yang ada kaitannya dengan masalah-masalah publik. Setiap warga Negara memiliki sikap kritis yang

membangun guna menentukan arah kebijakan publik yang berdasarkan pada tingkat pemahaman tentang informasi politik sedang berkembang.

#### 5) Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini ditekankan pada hubungan antar pribadi dan faktor-faktor kejiwaan yang mempengaruhi tingkah laku orang-orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Pendekatan tersebut sangat penting dalam memainkan pembentukan kebijakan.

### **E. Kebijakan Pengembangan berdasarkan RIPPDA**

Penyusunan RIPPDA Kabupaten Natuna dilakukan sebagai upaya mengembangkan potensi kawasan-kawasan wisata yang dimiliki daerah secara terpolo, terpadu dan dengan rencana program yang baik. Hal ini dimaksudkan agar target pengembangannya dapat dicapai dalam waktu yang cepat dan dari segi pembiayaan dapat lebih efisien.

RIPPDA adalah panduan dalam pengembangan objek wisata daerah yang memuat Materi Pokok Ketentuan Program Kepariwisata Daerah, yang juga merupakan induk rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan objek wisata/kawasan. Melalui RIPPDA Kabupaten Natuna nantinya akan menjadi awal dan proses perencanaan dalam upaya membangun dan mengembangkan daerah khususnya dari sektor pariwisata.

Sebagai suatu produk perencanaan, RIPPDA Kabupaten Natuna dalam penyusunannya akan melalui beberapa tahapan proses pelaksanaan dimana salah satu tahapan kegiatannya adalah penyusunan Laporan Antara. Sebagaimana diatur

dalam Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Daerah dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) penyusunan RIPPDA Kabupaten Natuna. dan Hasil dari RIPPDA Kabupaten Natuna ini pada akhirnya akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang berfungsi sebagai payung hukum kegiatan pembangunan dan pengembangan pariwisata daerah.

Adapun kebijakan pengembangan sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Natuna sesuai dengan Peraturan daerah No. 5 Tahun 2010 Tentang RIPPDA sebagai berikut:

a. Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Pariwisata

Pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur penunjang pariwisata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan serta untuk meningkatkan aksesibilitas bagi suatu objek dan daya tarik wisata. Pemenuhan kebutuhan akan prasarana pariwisata meliputi penyediaan jaringan jalan, air bersih, listrik, telepon dan lainnya. Pemenuhan kebutuhan akan sarana pariwisata meliputi akomodasi seperti hotel bintang, hotel melati, restoran/ rumah makan dan lainnya, disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan dan aspek pelestarian lingkungan serta dengan menonjolkan arsitektural daerah.

b. Pengembangan Sumber Daya dan Peningkatan Kelembagaan

Perhatian pada peningkatan kualitas dan kompetensi manusia sebagai tenaga kerja maupun juga sebagai konsumen dan wisatawan perlu mendapat perhatian melalui pendidikan formal, pelatihan, pemagangan, pelibatan dalam praktek kerja nyata, dll. Tujuan pengaturan dan kelembagaan pariwisata di Kabupaten Natuna adalah meningkatkan

pendapatan daerah dan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan terwujudnya kemudahan berwisata di Kabupaten Natuna. Kelembagaan dapat diartikan sebagai unsur-unsur dari sistem kepariwisataan yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

c. Pemasaran dan Promosi

Dalam upaya pengembangan kepariwisataan, fungsi pemasaran pariwisata menjadi amat penting karena dalam rangka memupuk keuntungan demi pengembangan usahanya dan memberi kepuasan kepada pelanggan, terkandung upaya produsen menyesuaikan produk dengan keinginan dan kebutuhan konsumen/wisatawan. Pemasaran pariwisata dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan

d. Pengembangan Produk wisata

Pada umumnya wisatawan mempunyai pengetahuan atau informasi yang kurang memadai mengenai tempat wisata. Pemahaman wisatawan terhadap suatu tempat, dalam hal ini adalah destinasi wisata sangat dipengaruhi oleh citra atau *image* yang ditampilkan dalam berbagai produk wisatanya.

## **F. Pengertian Pariwisata**

Pariwisata adalah rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktivitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil

masyarakat negara berkembang. Pariwisata semakin berkembang sejalan dengan perubahan-perubahan sosial, budaya, ekonomi, teknologi dan politik. (Gamal Suwanto, 2004: 1)

Menurut *I Gede Pitana (2005;155)*, Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa dampak terhadap masyarakat tempatan untuk itu diharapkan kepada Pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan kepariwisataan haruslah mampu untuk mempertimbangkan semua resiko yang akan terjadi selain keuntungan ekonomi di satu sisi, disisi lain membawa dampak positif maupun dampak negatif.

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. (Yoeti, 1996:118).

Dengan demikian pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan – pekerjaan rutin, keluar tempat tinggalnya dengan tujuan semata – mata untuk menikmati perjalanan atau bertamasyaan dan rekreasi.

Dinas kebudayaan dan pariwisata adalah salah satu satuan kerja di pemerintah Kabupaten / Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dibidang kebudayaan dan pariwisata.



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten natuna adalah satuan kerja dilingkungan kerja pemerintah Kabupaten Natuna sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mengenai kebudayaan dan pariwisata ditingkat Kabupaten Natuna.

Adapun fungsi dari Dinas tersebut secara umum adalah menjaga, mengelola, melestarikan, mempromosikan, dan memasarkan tantang potensi wisata dan kebudayaan di kabupaten.

## **2.2 Definisi Konsep**

Agar memudahkan dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian yang jelas dan permasalahan tidak kabur, maka diperlukan definisi konsep.

*Kebijakan* adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

*Implementasi Kebijakan* adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik.

*Analisis kebijakan* adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menelaah dengan cara menggunakan metode dan argumen berdasarkan data, fakta dan informasi pada tingkat politik untuk memecahkan masalah.

*Pariwisata* adalah rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktivitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang

*Objek wisata* adalah segala sesuatu yang menjadi pusat daya tarik wisatawan dan dapat memberikan kepuasan pada wisatawan, hal yang dimaksud dapat berupa keindahan alam, budaya, kesenian dan lain sebagainya.

*Pengembangan objek wisata* adalah pengenalan nilai budaya bangsa dan meningkatkan kualitas kebudayaan nasional dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan bangsa, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta merupakan pembangunan pariwisata dilakukan secara menyeluruh, terpadu dengan menjalin kerja sama pada sektor lain antara pengusaha (swasta) dan membuat objek wisata yang telah ada menjadi lebih baik, nyaman, lengkap, dan teratur.

*Pemerintah daerah* adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah dalam penyelenggaraanya dilakukan bersama-sama DPRD.

### **2.3 Konsep Operasional**

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
1. Kebijakan pengembangan aksesibilitas dan Infrastruktur.	a. Pelaksana program b. Kepentingan yang terpengaruhi c. Jenis manfaat yang di hasilkan d. Derajat perubahan yang dicapai e. Sumber daya yang di gunakan
2. Kebijakan pengembangan sumber daya dan kelembagaan	a. Pelaksana program b. Kepentingan yang terpengaruhi c. Jenis manfaat yang dihasilkan d. Derajat perubahan yang dicapai e. Sumber daya yang digunakan
3. Kebijakan Promosi dan Pemasaran	a. Pelaksana pogram b. Kepentingan yang terpengaruhi c. Jenis manfaat yang dihasilkan d. Derajat perubahan yang dicapai e. Sumber daya yang digunakan
4. Kebijakan pengembangan produk wisata	a. Pelaksana program b. Kepentingan yang terpengaruhi c. Jenis manfaat yang dihasilkan d. Derajat perubahan yang dicapai e. Sumber daya yang digunakan

## 2.4 Teknik Pengukuran

Untuk memudahkan menganalisa data, maka penilaian terhadap pelaksanaan variable atau indikator dalam lima tingkatan atau variasi. Adapun penilaian tersebut adalah : Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, Tidak Baik

Adapun teknik pengukuran yang digunakan dalam mengukur variabel penelitian adalah sebagai berikut :

- Sangat Baik : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel rekapitulasi berisikan antara 84-100% terhadap masing-masing indikator penelitian.
- Baik : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel rekapitulasi berisikan antara 68-83% terhadap masing-masing indikator penelitian.
- Cukup Baik : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel rekapitulasi berisikan antara 52-67% terhadap masing-masing indikator penelitian.
- Kurang baik : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel rekapitulasi berisikan antara 36-51% terhadap masing-masing indikator penelitian.
- Tidak Baik : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel rekapitulasi berisikan antara 20-35% terhadap masing-masing indikator penelitian.

## 2.5 Hipotesis

Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang kebenarannya perlu dibuktikan melalui data yang terkumpul (Sugiono,2007 : 183). Berdasarkan uraian maka penulis merumuskan hipotesis yaitu

“Diduga Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Daerah Kabupaten Natuna belum optimal.”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini penyusun menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya atau sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Metode deskriptif memiliki ciri – ciri sebagai berikut:

1. Memusatkan masalah dari pada masalah – masalah yang ada pada masa sekarang yaitu masalah yang aktual.
2. Data yang dikumpulkan pertama kali disusun, dijelaskan lalu dianalisis.

#### **3.2 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penulis menetapkan penelitian selama 3 Bulan terhitung 01 April sampai dengan 30 Juni. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat pada kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer**, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang secara resmi terstruktur yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan.
- b. Data Sekunder**, yaitu data dan informasi serta keterangan yang diperoleh dalam yang sudah jadi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dan sumber lainnya.

### 3.4 Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiono (2007: 90). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah unsur Pemerintah Kabupaten sebanyak 25 orang ( Dinas Pariwisata), dan 15 Pengusaha Pariwisata, jadi total populasi sebanyak 40 orang yang berhubungan dengan pengembangan objek wisata daerah kabupaten Natuna.

#### b. Sampel

Untuk menentukan sampel penelitian ini, penulis menggunakan teori yang di sampaikan oleh Sugiono (2007: 96), yaitu sample bertujuan (*Purposive Sample* ). Pada sample bertujuan jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan – pertimbangan informasi yang diperlukan dan jika terjadi pengulangan atau memberikan informasi sama, maka pencarian informasi boleh di akhiri. Dengan melihat tidak semua dari populasi yang ada mengetahui, memahami dan ikut terlibat didalam pembuatan kebijakan, dengan ini penulis mengambil sampel dari orang yang faham akan hal ini yaitu pimpinan dan orang yang berkecimpung dalam masalah ini.

Maka sampelnya adalah 1 orang Kepala Dinas Pariwisata, 1 orang Sekretaris, 1 orang Kepala Bidang Destinasi pariwisata, 1 orang Kepala Bidang Pemasaran pariwisata, 1 orang Kepala Bidang Seni Pertunjukan dan

Dokumentasi Kepariwisata sebagai key informan, 15 orang pengusaha pariwisata yang mewakili dari jenis usaha pariwisata.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Responden**

No	Klasifikasi Responden	Jumlah
1	Pemerintah	5
2	Pengusaha Pariwisata	15
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2011

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. **Wawancara** adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab langsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
2. **Observasi** yaitu teknik pengumpulan data dengan metode pengamatan secara langsung dan menggambarkan permasalahan yang sedang diamati sebagai objek kajian dari penelitian.
3. **Kuesioner** adalah teknik pengumpulan data dengan metode memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan responden akan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Kuisisioner ini ditujukan kepada subjek yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

### **3.6 Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan pada penelitian ini diperoleh, data tersebut dikelompokkan, diuraikan sesuai dengan jenis dan macam data, kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel yang dilengkapi dengan penjelasan untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis: yaitu sebuah analisa yang menjelaskan dan memaparkan kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya terjadi dilapangan dan di analisa terhadap masalah yang di temukan.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kabupaten Natuna

Sejarah Kabupaten Natuna tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kepulauan Riau, karena sebelum berdiri sendiri sebagai daerah otonomi, Kabupaten Natuna merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang menjadi Kabupaten Bintan).

Tertulis didalam sejarah bahwa Kabupaten Natuna yang dahulunya bernama Pulau Tujuh sebelum bergabung dalam Kepulauan Riau, telah memerintah beberapa orang “*Tokong Pulau*” (istilah yang diberikan kepada datuk kaya diwilayah pulau tujuh) yang menurut kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata “*tekong*” yang berarti Nahkoda yang memegang peranan dalam mengendalikan sebuah kapal atau perahu layar, di dalam pembicaraan sehari – hari “*Tokong*” artinya tanah busut yang menonjol ke permukaan laut yang sangat berbahaya untuk lalu lintas kapal yang melewati areal tersebut. Julukan tokong pulau yang diberikan kepada Datuk Kaya di Pulau Tujuh mengibaratkan seorang pemimpin yang mengendalikan pemerintahan diwilayah terkecil yang waktu itu diberi hak oleh Sultan Riau sesuai dengan ketentuan “Yayasan Adat” yang sudah ada pada masa itu.

#### 4.2 Geografi

Secara geografis Kabupaten Natuna terletak pada titik-titik koordinat antara 1<sup>0</sup>16’ – 7<sup>0</sup>19’ Lintang Utara (LU) dan 105<sup>0</sup>00’ – 110<sup>0</sup>00’ Bujur Timur (BT), dengan batas-batas wilayahnya :

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja;

- b. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bintan;
- c. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- d. Sebelah Timur, berbatasan dengan Negara Malaysia Timur (Serawak) dan Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai Kabupaten yang merupakan kepulauan, diketahui wilayahnya memiliki 154 pulau dengan 27 pulau yang berpenghuni dan 127 buah pulau belum berpenghuni. Dua pulau terbesar adalah Pulau Bunguran dan Pulau Serasan. Pulau-pulau yang ada dapat dikelompokkan dalam dua gugusan yaitu:

- a. Gugusan Pulau Natuna ; terdiri dari pulau Bunguran, Sedanau, Midai, Pulau Laut dan Pulau Tiga;
- b. Gugusan Pulau Serasan; terdiri dari pulau Serasan, Subi Besar dan Subi Kecil.

Berdasarkan kondisi geomorfologi, Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Dataran rendah dan landai banyak ditemukan di pinggir pantai. Ketinggian wilayah antar kecamatan cukup beragam, berkisar antar 3 m sampai 300 m dari permukaan laut dengan kemiringan 2 sampai 5 derajat, serta ada beberapa tempat lereng yang terjal.

Sedangkan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan yang tanah dasarnya mempunyai bahan granit dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus.

Iklim di Kabupaten Natuna sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret dan Mei, ketika angin

dari arah utara bertiup. Musim hujan terjadi pada bulan September sampai dengan Februari ketika arah angin bertiup dari Timur dan Selatan.

Curah hujan rata-rata setahun 2.000 mm<sup>3</sup> dengan kelembaban udara sekitar 85% dan temperatur 25°, dengan suhu udara berkisar antara 21°-34°.

### **4.3 Demografi**

Penduduk merupakan aspek utama dalam perencanaan pengembangan suatu daerah. Perencanaan disusun pada dasarnya untuk kesejahteraan penduduk, demikian halnya dengan RIPPDA Kabupaten Natuna, oleh karenanya pengetahuan mengenai kependudukan di Kabupaten Natuna merupakan faktor penting didalam rangka penyusunan RIPPDA Kabupaten Natuna.

Diketahui berdasarkan data base statistik terakhir dari Kabupaten Natuna Dalam Angka Tahun 2011 bahwa jumlah penduduk Kabupaten adalah sebesar 92.060 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut dilihat menurut jenis kelaminnya terbagi menjadi 47.902 jiwa penduduk laki-laki dan 44.158 jiwa penduduk perempuan. Adapun jumlah rumah-tangga tercatat sebanyak 18.796 rumah tangga.

Dilihat dari segi penyebaran penduduknya dapat dikatakan belum merata, Kecamatan Bunguran Timur memiliki jumlah penduduk yang tertinggi di Kabupaten Natuna yaitu sebesar 26,841 jiwa atau 29,16%, diikuti Kecamatan Bunguran Barat sebesar 15,437 jiwa atau 16,77% dan Kecamatan Pulau Tiga sebesar 7.428 jiwa atau 8.07%. Sementara kecamatan yang berpenduduk terendah adalah Kecamatan Pulau Laut sebesar 3.048 jiwa atau 3,31% dan Kecamatan Serasan Timur sebesar 3.477 jiwa atau 3,78%.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk**

No	Kecamatan	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Midai	3,414	3,316	6,730	1,847
2	Bunguran Barat	8,115	7,322	15,437	3,333
3	Bunguran Utara	2,975	2,745	5,720	1,180
4	Pulau Laut	1,562	1,486	3,048	650
5	PuLau Tiga	3,922	3,506	7,428	1,364
6	Bunguran Timur	14,055	12,786	26,841	4,602
7	Bunguran Timur Laut	2,363	2,181	4,544	1,256
8	Bunguran Tengah	2,171	1,980	4,151	774
9	Bunguran Selatan	2,489	2,322	4,811	772
10	Serasan	2,995	2,892	5,887	1,439
11	Subi	2,046	1,940	3,986	805
12	Serasan Timur	1,795	1,682	3,477	774
Kabupaten Natuna		47,902	44,158	92,060	18,796

Sumber: Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Natuna

#### 4.4 Sosial Budaya dan Pendidikan

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Perkembangan dibidang pendidikan dari tahun ke tahun di Kabupaten Natuna menunjukkan tren kenaikan termasuk wilayah pesisirnya. Hal ini dapat terlihat melalui indikator-indikator kuantitas dan kualitas institusi pendidikan, jumlah guru, murid dan tingkat partisipasi sekolah dari tahun ke tahun.

**Tabel 4.2**  
**Rasio Murid – Sekolah Kabupaten Natuna 2011**

No	Kecamatan	TK	SD	MI	SM P	MTs	SM A	M A	SMK
1	Midai	55	105	74	223	114	185	53	
2	Bunguran Barat	27	113		132	105	162	78	80
3	BunguranUtara	29	103		109	23	122		
4	Pulau Laut	22	101		146		94		
5	Pulau Tiga	17	102		135		158		
6	Bunguran Timur	122	237		261	163	444	20 5	179
7	Bunguran Timur Laut	38	88	134	115	53			
8	Bunguran Tengah	54	96		235	15		15	
9	Bunguran Selatan	27	72		104		79		
10	Serasan	40	90		195	71	289		
11	Subi	26	33		65		89		
12	Serasan Timur	24	112		144				
	Kabupaten Natuna	36	108	104	108	75	202	87	145

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Natuna, Tahun 2011

Produk utama yang dihasilkan di Kabupaten Natuna berasal dari sektor pertambangan yang terdiri dari Minyak, Gas Alam dan Barang Tambang. Sektor utama lainnya adalah Pariwisata, Perkebunan Kelapa dan Cengkeh serta hasil Perikanan.

#### 1. Pertambangan

Sektor pertambangan adalah potensi utama Kabupaten Natuna yang terdiri dariminyak, gas alam dan barang tambang. Hingga tahun 2005 terdapat 3 buah perusahaan minyak lepas pantai Conocophilip, Star Energy, dan Premeir Oil. Setidaknya terdapat 24 lokasi penggalan batu dan 22 lokasi penggalan pasir diseluruh kecamatan kecuali Kecamatan Serasan dan Bunguran Barat. Kecamatan

yang memiliki peluang investasi terbesar adalah Bunguran Timur dengan 18 lokasi penggalian batu dan 17 lokasi penggalian pasir.

## 2. Industri

Pengembangan industri yang berkembang di Kabupaten Natuna terdiri dari industri makanan dan minuman, perkayuan dan produk kayu serta industri produk berbahan logam yang sebagian besar merupakan industri berskala kecil. Kegiatan Industri di Kabupaten Natuna dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu: industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga.

Perusahaan industri besar adalah perusahaan industri yang mempekerjakan 100 orang atau lebih, sedangkan yang dikategorikan sebagai perusahaan industri sedang adalah perusahaan yang mempekerjakan 20 - 99 orang tenaga kerja. Kategori perusahaan industri kecil adalah perusahaan yang memiliki tenaga kerja antara 5 - 19 orang, dan untuk kelompok industri rumah tangga yaitu usaha industri yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 (lima) orang.

Perusahaan industri kerajinan rumah tangga merupakan kelompok industri yang paling dominan di Kabupaten Natuna. Terdapat 295 perusahaan industri kerajinan rumah tangga di Kabupaten Natuna, dan mampu menyerap sebanyak 502 orang tenaga kerja.

Perkembangan kegiatan Industri kerajinan dari tahun 2005 hingga tahun 2007 terlihat mengalami peningkatan, namun pada tahun 2008 terjadi penurunan jumlah kegiatan usaha yang cukup besar, hal ini dapat di maklumi mengingat telah terjadi pemekaran wilayah administrasi kabupaten, dimana beberapa

kecamatan dimekarkan menjadi kabupaten Anambas, oleh karenanya data jumlah kegiatan industri kerajinan dari tahun 2005 hingga 2007 kemungkinan datanya masih bersatu dengan data-data kecamatan yang masuk dalam pemekaran kabupaten tersebut. Namun pada Tahun 2009 kegiatan Industri kerajinan kembali mengalami peningkatan.

Sementara itu jumlah kegiatan industri sedang dan kecil di Kabupaten Natuna secara keseluruhan berjumlah 23 unit, dari segi penyebaran lokasi industri sedang dan kecil ini diketahui sebagian besar 43% berlokasi di Kecamatan Bunguran Timur.

### 3. Pertanian

Data Tahun 2011, menunjukan bahwa jenis usaha pertanian tanaman pangan meliputi tanaman bahan makanan dan sayur-sayuran. Komoditas tanaman bahan makanan terdiri dari tanaman padi, jagung, ubikayu, ubi jalar dan kacang tanah. Jumlah luas tanam bahan makanan secara keseluruhan adalah 675,45 ha, dimana luas tanaman padi seluas 111,25 Ha, jagung 190 Ha, Ubi kayu 221 Ha, Ubi Jalar 101,2 Ha dan Kacang Tanah 46,4 Ha. Adapun luas panen bahan makanan adalah sebesar 473,56 Ha dengan rincian luas panen tanaman padi 67 Ha, Jagung 163 Ha, Ubi Kayu 135,1 Ha, Ubi jalar 77,86 Ha dan Kacang Tanah 26,1 Ha. Jumlah produksi tanaman bahan makanan untuk padi 180,2 ton, jagung 435,7 ton, ubi kayu 1686,5 ton, ubi jalar 596,85 ton dan kacang tanah 68,95 ton. Kecamatan Serasan Timur, Serasan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur merupakan kecamatan yang memberikan kontribusi tertinggi dari hasil produksi

tanaman bahan makan yaitu masing-masing sebesar 19,71%, 15,40%, 13,97% dan 12,24%.

Untuk Tanaman sayur-sayuran diketahui bahwa luas secara keseluruhan adalah 447 Ha dengan rincian tanaman Cabe 58,5 Ha, Ketimun 67,4 Ha, Terong 41,05 Ha, Kacang Panjang 68,95 Ha, Bayam 74,25 Ha, Kangkung 51,65 Ha, Petai dan Sawi 83,35 Ha.

#### 4. Perkebunan

Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting di dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Natuna. Data Tahun 2010 menunjukkan luas tanaman perkebunan secara keseluruhan adalah 32.112 Ha dengan rincian Tanaman Karet 3.982 Ha, Kelapa 14.006 Ha, Kelapa Sawit 1.760 Ha, Kopi 42 Ha, Cengkeh 12.190 Ha dan Tanaman Lada 132 Ha. Dilihat dari luasan lahannya yang merupakan tanaman perkebunan yang cukup potensial di Kabupaten Natuna adalah tanaman kelapa dan cengkeh

#### 5. Peternakan

Pengembangan kegiatan peternakan ditujukan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak, serta usaha dalam memperbaiki gizi masyarakat, di samping untuk meningkatkan pendapatan petani dalam bidang kegiatan peternakan. Jenis ternak yang umum di pelihara penduduk adalah Sapi, Kerbau, Kambing, Ayam dan Itik. Pada tahun 2010 jumlah ternak Sapi sebesar 6.422 ekor, Kerbau 16 ekor, Kambing 1.371 ekor, Ayam 76.233 ekor dan Itik sebesar 3.783 ekor.



## 6. Perikanan

Kabupaten Natuna memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah. Hal ini didukung oleh daerahnya yang berbentuk kepulauan. Volume produksi perikanan tangkap tahun 2010 mencapai 38.588,18 ton, dimana Kecamatan Bunguran Barat dan Serasan merupakan pemasok angka produksi paling tinggi yaitu 10.321,37 dan 9.119 ton. Adapun komoditas perikanan tangkap di kabupaten ini antara lain ikan napoleon, kerapu, tongkol, kuwe, kurisi, tembang/sardine, teri, lobster, cumi-cumi, dan kepiting. Namun komoditas utama yang menjadi andalan adalah naopleon, kerapu, tongkol dan lobster. Sementara angka produksi perikanan budidaya pada tahun 2010 yaitu sebesar 196.355 ton. Jumlah kapal/perahu penangkap ikan di Kabupaten Natuna pada tahun 2009 adalah sebanyak 2.848 unit kapal/perahu bermotor dan 1.970 unit perahu tanpa motor.

## 7. Pariwisata

Walaupun terdapat banyak potensi wisata yang ditunjang oleh keindahan alam dan keanekaragaman hayati, namun sektor pariwisata belum dikelola secara optimal. Beberapa peluang investasi dalam pengembangan wisata kini menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Natuna. Diantaranya peluang tersebut adalah objek wisata yang terdapat di Pantai Sisi di kecamatan Serasan yang di dalamnya terdapat air celupan tujuh warna yang membutuhkan pengembangan resort, hotel/motel, cottage, restoran seafood, kafe, serta fasilitas rekreasi dan olah raga air.

#### 4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pariwisata sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Dinas Pariwisata yaitu melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya.

Fungsi Dinas Pariwisata sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi keuangan, umum dan kepegawaian.
- b. Penyusunan program di bidang pariwisata.
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pariwisata. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan
- d. teknis di bidang destinasi dan pemasaran pariwisata.
- e. Penyelenggaraan dan pengendalian di bidang pariwisata.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan susunan organisasi dan tata kerja tersebut sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 tahun 2011,

Tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Destinasi Pariwisata
4. Bidang Pemasaran Pariwisata
5. Bidang Seni Pertunjukan dan Dokumentasi Kepariwisata
6. Kelompok Jabatan Fungsional

**a. Kepala Dinas Pariwisata**

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan operasional bidang pariwisata melaksanakan sebagai kewenangan, desentralisasi, dekonsetrasi serta tugas pembantu yang dilimpahkan oleh Bupati.
- b. Kepala Dinas Pariwisata berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati.

Untuk melaksanakan tugas kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna menyelenggarakan fungsi :

- a. Memimpin, mengkoordinasi, mengusulkan kebijakan, mengambil keputusan, mengevaluasi dan melaporkan program/kegiatan Bidang Pariwisata kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

## **b. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan, urusan keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga
- b. Penyusunan perencanaan, mengumpulkan, mensistiminasikan dan mengumpulkan program serta evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha dan tata kearsipan.
- b. Pelaksanaan tata usaha keuangan dan kepegawaian.
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan,
- d. Mengumpulkan, mensisteminasikan dan menyusun program serta evaluasi,
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya di Sekretariat yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pariwisata.

Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mensistimasi data untuk bahan penyusunan program.
- b. Mengelola, mengkoordinasikan, memonitor, menganalisa pelaksanaan rencana dan program dinas.
- c. Menyusun laporan program kegiatan pembangunan.
- d. Melaksanakan kegiatan evaluasi program kegiatan pembangunan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan.
- b. Menyelenggarakan urusan tata usaha kepegawaian dalam mengumpulkan data kepegawaian, formasi pegawai dan perencanaan pegawai;
- c. Mengkoordinir administrasi dan inventaris barang dan serta membuat laporan pengadaan barang;
- d. Menyelenggarakan urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga dinas;
- e. Membuat dokumentasi kegiatan kepegawaian;

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana anggaran dinas;

- b. Melaksanakan pembukuan pertanggungjawaban, verifikasi, laporan dan pembinaan bendaharawan.
- c. Melaksanakan dan penyelesaian administrasi pegawai.
- d. Menyusun dan melaporkan pengelolaan keuangan.

**c. Bidang Seni Pertunjukan dan Dokumentasi Kepariwisata.**

Bidang Seni Pertunjukan dan Dokumentasi Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan dan pengembangan di Bidang Seni Pertunjukan dan Dokumentasi Kepariwisata.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Seni Pertunjukan dan Dokumentasi Kepariwisata mempunyai fungsi:

- a. Kebijakan teknis dalam pengembangan nilai Seni, pengelolaan kekayaan dan keragaman seni serta pengembangan kesenian;
- b. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan nilai seni pengelolaan pengembangan dan keragaman seni serta pengembangan kesenian;
- c. Menyelenggarakan pengembangan nilai seni, pengelolaan kekayaan dan keragaman seni serta pengembangan kesenian daerah;
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama seni daerah;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pengembangan nilai seni, pengelolaan kekayaan dan keragaman seni serta pengembangan kerjasama kesenian daerah.

Bidang Seni Pertunjukan dan Dokumentasi Kepariwisataaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pariwisata.

Bidang Seni Pertunjukan dan Dokumentasi Kepariwisataaan :

- a. Seksi Seni Pertunjukan;
- b. Seksi Dokumentasi Kepariwisataaan.

Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Seni Pertunjukan dan Dokumentasi Kepariwisataaan.

Seksi Seni Pertunjukan, mempunyai tugas:

- a. Penanggungjawab tugas seksi seni pertunjukan;
- b. Menyiapkan serta menyusun program atraksi seni pertunjukan;
- c. Menyelenggarakan even seni tradisional secara berkala baik dalam kapasitas nasional maupun internasional.
- d. Mengumpulkan, menyusun, menyiapkan bahan pembinaan serta upaya pengembangan atraksi seni sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;
- e. Melakukan pengawasan, pembinaan sanggar seni tradisional dan modern serta lembaga seni daerah;
- f. Membantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan pengarsipan.

Seksi Dokumentasi Kepariwisataaan mempunyai tugas :

- a. Penanggungjawab tugas seksi dokumentasi kepariwisataan.

- b. Membantu kabid dalam melaksanakan tugas tentang dokumentasi dan kepariwisataan.
- c. Menyiapkan, mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan atraksi seni, promosi dan ODTW kepariwisataan dalam bentuk media cetak, film, slide, poster, leaflet dan lain-lain.
- d. Membuat dan menyusun bahan-bahan pendataan melalui media elektronik berupa database seni dan kepariwisataan.
- e. Melakukan pendataan, kajian dan penelitian terhadap unsur-unsur atraksi seni daerah yang pernah ada maupun yang sedang berkembang.
- f. Membantu kabid dalam melaksanakan tugas dan pengarsipan.

#### **d. Bidang Destinasi Pariwisata**

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pariwisata dalam mengembangkan sarana prasarana wisata, objek dan daya tarik pariwisata buatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pembinaan terhadap tim satuan pengamanan dan keselamatan wisatawan;
- b. Menginventarisir jumlah pengunjung hotel / penginapan;
- c. Melaksanakan koordinasi perlindungan dan pengawasan terhadap wisatawan kepada pihak terkait;
- d. Melakukan penataan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata;



- e. Melakukan pembinaan dan SDM dibidang sarana dan prasarana dan objek dan daya tarik pariwisata;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mengembangkan sarana dan prasarana serta objek dan daya tarik wisata;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dan pengelolaan dan daya tarik wisata;
- h. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata daerah.

Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pariwisata.

Bidang Destinasi Pariwisata membawahi:

- a. Seksi pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;
- b. Seksi Objek Daerah Tujuan Wisata.

Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Menginventarisir tentang jumlah pengunjung hotel / penginapan;
- b. Membina dan mengembangkan SDM dibidang sarana dan prasarana pariwisata;
- c. Menyiapkan bahan pengembangan sarana dan prasarana wisata;

- d. Menyiapkan bahan data untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

Seksi Objek Daerah Tujuan Wisata mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan terhadap tim satuan pengamanan dan keselamatan wisatawan;
- b. Melaksanakan perlindungan dan pengawasan terhadap wisatawan;
- c. Melakukan penataan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata;
- d. Membina dan mengembangkan SDM dibidang objek dan daya tarik pariwisata;
- e. Menyiapkan bahan untuk koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga untuk mengembangkan objek dan daya tarik pariwisata;
- f. Menyiapkan bahan untuk pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan daya tarik wisata;
- g. Melakukan pendataan dan pembinaan objek wisata dan daya tarik wisata;
- h. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata;

- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

**e. Bidang Pemasaran Pariwisata**

Bidang Pemasaran Pariwisata membantu kepala dinas dalam pemasaran pariwisata khususnya promosi pariwisata, kerjasama regional dan internasional serta mengawasi dan menertibkan perizinan usaha pariwisata.

Untuk menjalankan tugas, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pemasaran dan pelaku usaha pariwisata.
- b. Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelaku-pelaku usaha di bidang pariwisata;
- c. Menyelenggarakan dan mengikuti even-even pemasaran pariwisata;
- d. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pemasaran pariwisata;
- e. Melakukan pembinaan dan pengembangan SDM dibidang pemasaran pariwisata;
- f. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan laporan bidang pemasaran pariwisata.

Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pariwisata.

Bidang Pemasaran Pariwisata membawahi :

- a. Seksi Analisa Pasar, Sarana Promosi dan Kerjasama Pariwisata;
- b. Seksi Informasi, Pembinaan dan Pengendalian Jasa Usaha Pariwisata

Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

Seksi Analisa Pasar, Sarana Promosi dan Kerjasama Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi seni dan pariwisata;
- b. Menyiapkan bahan dalam upaya mengembangkan pembangunan sarana prasarana promosi dalam bentuk media cetak, film, slide, poster, leaflet, dan lain-lain;
- c. Menyelenggarakan dan mengikuti atraksi dan even-even dalam rangka promosi seni dan pariwisata ditingkat regional, nasional dan internasional;
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama regional, nasional dan internasional;
- e. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata;
- f. Membina dan mengembangkan SDM dibidang promosi wisata;
- g. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan bidang promosi wisata.

Seksi Informasi, Pembinaan dan Pengendalian Jasa Usaha Pariwisata:

- a. Pemantauan dan pembinaan dan Pengendalian jasa pariwisata;

- b. Memproses perizinan usaha dan jasa pariwisata yang meliputi :  
pemberian izin, pengawasan dan penertiban usaha perhotelan, bar, dan festival kesenian dan hiburan, taman rekreasi, taman laut, pantai, pulau, bumi perkemahan, pondok wisata, gelanggang renang, gelanggang permainan, travel biro, informasi seni dan pariwisata;
- c. Mengumpulkan data serta menyusun bahan pembinaan usaha dan jasa pariwisata;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap sarana-sarana dalam upaya peningkatan mutu pelayanan jasa bagi wisatawan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Membina dan mengembangkan SDM dibidang pengendalian jasa usaha pariwisata;
- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal pengawasan dan penertiban usaha pariwisata;
- g. Mengumpulkan dan menyusun laporan bidang jasa usaha pariwisata;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

#### **4.6 Visi dan Misi Dinas Pariwisata**

##### **a. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi

Pemerintah Kabupaten Natuna 2012-2016, maka visi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna 2011 – 2016 adalah:

***”Terwujudnya Daerah Tujuan Wisata Dan Seni Budaya Yang Menarik“.***

#### **b. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna 2011 – 2016 adalah sebagai berikut :

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2011 – 2016, yaitu:

- a. Mengembangkan destinasi pariwisata bahari unggulan.
- b. Melestarikan, melindungi dan mengembangkan seni daerah Kabupaten Natuna.
- c. Membina pelaku pariwisata dan penggiat seni.

#### **4.7 Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kab. Natuna**

Struktur organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang jelas dalam memberikan kewenangan dan tanggungjawab dari setiap yang ada dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah. Dengan adanya struktur organisasi dan koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara jelas, efektif dan efisien.

Struktur organisasi pada Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna akan memudahkan bagi pegawai/staf dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya masing-masing, serta kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Selain itu melalui garis struktur organisasi yang mana tugas dan wewenang serta tanggungjawab telah tergambar dan dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan akan mampu beralasan dengan baik sesuai dengan arahan-arahan maupun sasaran dari organisasi, sehingga semuanya menjadi jelas dan dapat berjalan dengan baik karena dengan adanya struktur organisasi yang jelas akan membantu dalam mencapai tujuan tersebut.

Organisasi selalu memiliki bagian struktur organisasi yang dapat dikatakan sebagai suatu garis koordinasi yang menggambarkan secara sistematis bagaimana hubungan kerja dari setiap orang yang ada didalam suatu organisasi tersebut. jadi suatu organisasi akan selalu terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

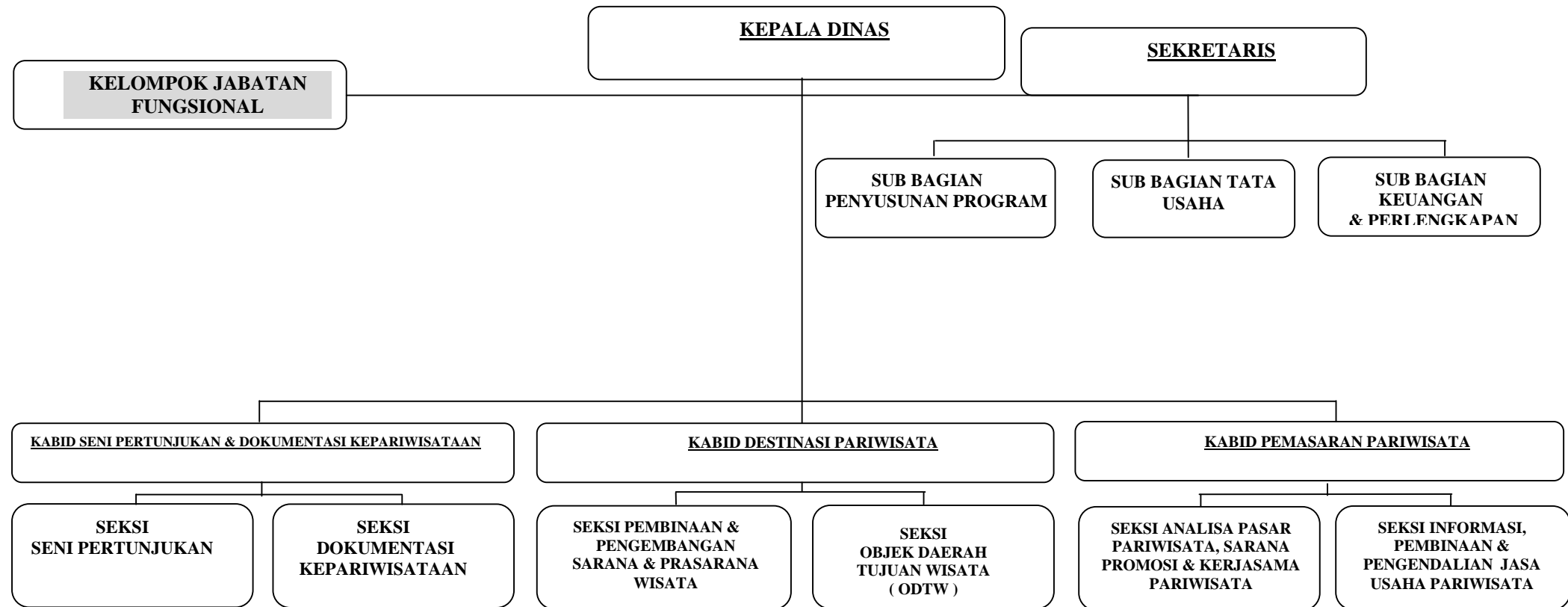
- a. Adanya pimpinan.
- b. Adanya sekelompok manusia yang dipimpin
- c. Adanya kerjasama.
- d. Adanya tujuan

Dari beberapa unsur tersebut diatas ternyata unsur pemimpin mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam suatu organisasi yang juga sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kelancaran jalannya kegiatan-kegiatan organisasi dan seluruh aktifitas yang ada didalam Dinas Pariwisata yang di Pimpinnya. Seorang pemimpin harus dapat dan mampu menciptakan suatu keadaan dimana bawahannya merasa ikut memiliki instansi/organisasi yang mereka pimpin dan

merasa aman serta senang hati dalam bekerjasama untuk tercapainya tujuan dari Dinas Pariwisata.

Bagi suatu instansi pemerintah yang menginginkan agar tujuannya tercapai. Disamping melaksanakan aktifitasnya dengan baik dan memperhatikan semua kebutuhan yang diperlukan instansi tersebut juga semestinya memiliki sebuah strktur organisasi yang ada pada dasarnya akan memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan instansi yang bersangkutan.







## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1. Identitas Responden**

Identitas responden dari penelitian Analisis Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Daerah Kabupaten Natuna yang berjumlah 10 Orang Responden. dan selanjutnya penulis klasifikasikan berdasarkan tingkat umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Untuk melihat kategori responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

##### **a. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berikut ini merupakan data responden yang ditinjau dari jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Data ini di buat untuk melihat perbandingan antara jumlah responden laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1**  
**Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Laki-Laki	11	70 %
2	Perempuan	9	30%
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data olahan lapangan 2012

Dari tabel 5.1 di atas terlihat jumlah responden menunjukkan bahwa responden laki-laki berjumlah 11 orang (55%), sedangkan yang perempuan berjumlah 9 orang (45%). Dengan demikian terlihat bahwa responden pada Penelitian ini lebih banyak laki-laki dibanding perempuan.

b. Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Umur.

Untuk mengetahui tingkat umur Responden Penelitian ini , penulis akan menyajikan mengenai identitas responden berdasarkan kelompok umur pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2**  
**Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Umur**

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	31-35	3 Orang	15%
2	36-40	4 Orang	20%
3	41-45	4 Orang	20%
4	46-50	5 Orang	25%
5	Diatas 50	4 Orang	20%
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan Lapangan 2012

Dengan melihat tabel 5.2. diatas maka dapat diketahui umur Responden sangat bervariasi yaitu umur diantara 31-35 tahun sebanyak 3 orang (15%), umur 36-40 sebanyak 4 orang (20%), umur 41-45 sebanyak 4 orang (20%), umur 46-50 sebanyak 5 orang (25%) dan diatas umur 50 sebanyak 4 orang (20%). Jadi umur Responden penelitian ini yang paling dominan umur 46-50 tahun.

c. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui gambaran dan tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.3**  
**Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SLTA	10	50%
2	S.1	8	40%
3	S.2	2	10%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.3. tersebut jumlah Responden dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan mereka bervariasi. Tingkat Pendidikan SLTA berjumlah 10 orang atau 50%, tamat S1 Berjumlah 8 Orang atau 40% sedangkan S2 berjumlah 2 Orang atau 10%. Tingkat pendidikan yang paling dominan adalah SLTA yang berjumlah 10 orang (50%).

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa secara umum tingkat pendidikan responden sudah dapat dikatakan baik karena mayoritas. Karena variasi tingkat pendidikan responden sudah cukup baik yang mana mencakup seluruh tingkat pendidikan yakni mulai dari tingkat, SLTA dan ada juga yang Sampai dengan tingkat S2.

#### d. Identitas Responden Berdasarkan Lama Bertugas

Masa kerja atau lama bertugas responden merupakan pengalaman responden dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan selama bekerja di instansi maupun menjalankan usaha pariwisata tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai lama Bertugas responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.4**  
**Identitas Responden Berdasarkan Lama Bertugas**

No	Lama Bertugas	Frekuensi	Persentas
1	1-10 Tahun	5	25%
2	11-20 Tahun	9	45%
3	21 Tahun Ke Atas	6	30%
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber Data : Data Olahan Lapangan 2012

Dengan dilihat Tabel 5.4. diatas maka dapat diketahui bahwa mayoritas pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dan juga pengusaha pariwisata telah melaksanakan pekerjaannya selama 1-10 tahun sebanyak 5 orang (25%), 11-20

tahun sebanyak 9 orang (45%) sedangkan 21 tahun keatas sebanyak 6 orang (30%) pegawai dan pengusaha pariwisata yang telah bekerja pada bidang tersebut. Jadi yang paling dominan pegawai melakukan pekerjaanya selama 11-20 tahun yaitu sebanyak 9 orang (45%).

## **5.2 Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Daerah Kabupaten Natuna**

Kebijakan pengembangan pariwisata daerah merupakan salah satu upaya pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, keanekaragaman flora dan fauna, serta seni dan budaya yang semua ini merupakan sumber daya dan modal yang harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Adapun kebijakan pengembangan sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Natuna sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2010 Tentang RIPPDA sebagai berikut:

- a. Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Pariwisata
- b. Pengembangan Sumber Daya dan Peningkatan Kelembagaan.
- c. Pemasaran dan Promosi.
- d. Pengembangan Produk Wisata

Implementasi kebijakan harus menitik beratkan pada kebutuhan masyarakat sehingga apa yang dibuat dan akan dikerjakan lebih menguntungkan masyarakat di Kabupaten Natuna. Kemudian dari itu kebijakan yang dibuat harus

di cocokkan dengan sumber daya yang tersedia di daerah, yang dapat menunjang keberhasilan dari sebuah kebijakan tersebut.

Untuk mewujudkan visi maka perlu dirumuskan sasaran berupa target dan standar yang ingin dicapai pemerintah daerah Kabupaten Natuna dalam penerapan kebijakan pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Natuna, berupa:

1. Meningkatkan pendapatan daerah pada sektor objek – objek wisata yang ada di daerah.
2. Meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat sekitar objek wisata.
3. Memberikan pemahaman tentang sadar wisata kepada masyarakat.
4. Melibatkan organisasi dan lembaga swasta dalam pengelolaan objek wisata.

Menurut Mirille S. Grindle (Nugroho, 2004 : 174) bahwa berhasil tidaknya implementasi kebijakan sangat ditentukan dua variabel besar, yakni variabel (isi kebijakan) dan variabel (lingkungan kebijakan).

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakan
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
  - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.

- b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik, menurut Mirille S. Grindle, amat ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri yang terdiri dari konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Isi Kebijakan (content of policy) mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (*interest affected*).
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan (*type of benefit*).
- c. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*).
- d. Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*).
- e. (Siapa) pelaksana program (*program implementers*).
- f. Sumber daya yang dikerahkan (*resources committed*).

Sedangkan variabel lingkungan mencakup :

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik dan lembaga penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tangkap.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh isi atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan juga apakah sebuah kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.



Dalam tabel penelitian membahas seluruh tanggapan 10 responden penelitian dalam menjawab pertanyaan yang berupa kuesioner yang peneliti laksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. Sebelum peneliti membuat daftar pertanyaan beserta alternatif jawaban yang diberikan kepada responden dan kemudian responden menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu peneliti melakukan observasi sebagai alat pemantau atau turun lapangan terhadap kuesioner, sehingga diharapkan dari responden tidak menyimpang dari keadaan yang sebenarnya.

**a. Kebijakan Pengembangan Aksesibilitas dan Infrastruktur**

Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan serta untuk meningkatkan aksesibilitas bagi suatu objek dan daya tarik wisata. Pemenuhan kebutuhan akan prasarana pariwisata meliputi penyediaan jaringan jalan, air bersih, listrik, telepon, hotel atau penginapan, kios, travel, restoran, sarana olahraga dan lainnya yang mencakup pemenuhan kebutuhan wisatawan.

Pengembangan kepariwisataan ini diarahkan pada kemudahan – kemudahan dan kemurahan biaya pencapaian dari sumber – sumber wisatawan ke objek wisata serta daya tarik wisata dalam kawasan wisata dan berbagai sarana pendukung lainnya.

Peningkatan infrastruktur merupakan langkah fundamental untuk menarik wisatawan yang akan berkunjung ke Natuna, pengembangan sistem jaringan aksesibilitas sehingga memudahkan akses perjalanan wisata yang mudah.

Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas oleh Dinas Pariwisata yang dilaksanakan oleh Bidang Destinasi yang mempunyai tugas dalam mengembangkan sarana dan prasarana wisata, objek, dan daya tarik wisata buatan dengan melakukan penataan dan pengembangan objek wisata dan daya tarik wisata, melakukan pembinaan dan SDM dibidang sarana dan prasarana, koordinasi dengan dengan instansi terkait dalam rangka mengembangkan prasarana.

Adapun indikator – indikator dari kegiatan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur yaitu :

#### 1. Pelaksana Program

Pengembangan infrastruktur dimaksudkan untuk memberi kenyamanan bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Natuna. Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur ini meliputi pembangunan tempat – tempat pariwisata, sarana jalan akses transportasi dan telekomunikasi. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksana program dalam peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur dapat di lihat tabel berikut:

**Tabel 5.5**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana Program dalam**  
**Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	-	-
2	Baik	5	25%
3	Cukup Baik	8	40%
4	Kurang Baik	7	35%
5	Tidak Baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.5 diatas, tanggapan responden terhadap pelaksana program kegiatan Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur dapat di kategorikan “Cukup Baik” yaitu 8 orang (40%) dari total responden, 5 orang (25%) responden mengatakan Baik, sedangkan 7 orang (35%) mengatakan Kurang Baik. Jawaban diatas diambil berdasarkan jawaban responden dari kuisioner yang peneliti berikan. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan untuk pelaksana program dalam kegiatan ini sudah sesuai dengan jawaban responden diatas. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Syamsul Hilal selaku Kepala Dinas Pariwisata, beliau mengatakan bahwa :

“Untuk kegiatan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas demi mendukung majunya pariwisata di Kabupaten Natuna, kami berupaya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (kontraktor) untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan Dinas Pariwisata dapat melaksanakan kegiatan yang lainnya yang berkenaan dengan kegiatan pariwisata Kabupaten Natuna”. (wawancara 2012).

Jadi, berdasarkan tabel 5.4 diatas, dapat dinyatakan bahwa pelaksana program dalam kegiatan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur sudah sesuai dan termasuk dalam kategori Cukup Baik. Kegiatan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas Pariwisata yang bekerja sama dengan pihak ketiga atau kontraktor sebagai pelaksana program.

## 2. Kepentingan yang terpengaruhi

Dengan adanya pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur berarti pemerintah telah membantu dalam membuka akses baru kewilayah perkampungan yang terletak pada objek wisata yang sulit di jangkau oleh pengunjung sehingga memudahkan untuk berkunjung kewilayah tersebut dan juga dapat memberikan

peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat dan juga pengusaha pariwisata yang ada di daerah objek wisata tersebut. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kepentingan yang terpengaruhi dalam peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur dapat di lihat tabel berikut:

**Tabel 5.6**  
**Tanggapan Responden Mengenai Kepentingan Yang Terpengaruhi**  
**Dalam Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	2	10%
2	Baik	5	25%
3	Cukup Baik	7	35%
4	Kurang Baik	6	30%
5	Tidak Baik	-	
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.6 diatas, tanggapan responden terhadap Kepentingan yang terpengaruhi dalam kegiatan Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur dapat di kategorikan “Cukup Baik” yaitu 7 orang (35%) dari total responden. 2 orang (10%) Responden Mengatakan sangat baik sedangkan 5 (25%) orang mengatakan Baik dan 6 orang (30%) mengatakan Cukup Baik berdasarkan jawaban kuisisioner yang penulis berikan.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan penulis menemukan perbedaan dengan jawaban responden dengan kejadian dilapangan bahwa pengaruh dari kebijakan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas belum maksimal pengaruhnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Panibar selaku pengusaha Pariwisata di bidang Travel wisata mengatakan :

“Untuk kegiatan Peningkatan aksesibilitas dan Infrastruktur ini pengaruhnya seharusnya dirasakan oleh masyarakat maupun wisatawan lebih lagi bagi kami pengusaha pariwisata, karena dengan peningkatan kebijakan aksesibilitas dan infrastruktur tersebut memudahkan bagi masyarakat dan juga wisatawan untuk melakukan aktivitas baik itu kegiatan sehari – hari masyarakat sekitar maupun perjalanan wisata wisatawan dan juga menambah pendapatan bagi kami para pengusaha akan tetapi pada kenyataan dilapangan kami selaku pengusaha masih merasa kesulitan untuk melayani perjalanan wisatawan karena ada beberapa ruas jalan menuju tempat wisata yang rusak dan wisatawan mengeluh dengan kondisi tersebut “. (wawancara 2012).

Jadi, berdasarkan tabel 5.6 diatas dan dapat dinyatakan bahwa Kepentingan yang terpengaruhi dalam kegiatan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur termasuk dalam kategori Cukup Baik. Namun berdasarkan Observasi dan wawancara yang penulis lakukan pengaruh dari kegiatan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur belum optimal.

### 3. Jenis Manfaat yang dihasilkan

Berdasarkan kondisi yang ada, Pemerintah Daerah seharusnya sudah memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal sehingga dapat memberikan keuntungan yang besar bagi daerah. Dengan adanya RIPPDA tentang pengembangan objek wisata daerah dapat menjadi arah bagi perkembangan pariwisata Kabupaten Natuna secara maksimal sehingga mampu menjadi pendapatan daerah dan juga peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap jenis manfaat yang dihasilkan dalam kegiatan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.7**  
**Tanggapan Responden Mengenai Manfaat yang dihasilkan Dalam**  
**Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	2	10%
2	Baik	4	20%
3	Cukup Baik	8	40%
4	Kurang Baik	6	30%
5	Tidak Baik	-	
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.7 diatas, tanggapan responden terhadap manfaat yang dihasilkan dalam kegiatan Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur dapat di kategorikan “Cukup Baik” yaitu 8 orang (40%) dari total responden. 2 orang (10%) Responden Mengatakan Sangat Baik, sedangkan 4 orang (20%) Mengatakan Baik dan 6 (30%) mengatakan Kurang Baik.

Jadi, berdasarkan tabel 5.7 diatas, dapat dinyatakan bahwa manfaat yang dihasilkan dalam kegiatan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur termasuk dalam kategori Cukup Baik. Kebijakan pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Natuna mendapat respon yang baik karena pariwisata menyentuh berbagai aspek kehidupan sehingga manfaat yang akan dihasilkan cukup banyak bagi masyarakat.

Namun berdasarkan observasi yang penulis lakukan ada indikasi bahwa manfaat yang di inginkan dalam kegiatan pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari manfaat yang dihasilkan belum menyeluruh bagi pengusaha maupun masyarakat. Hal ini di benarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna Bapak Drs. Syamsul Hilal, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa :

“Pariwisata memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan di suatu daerah. Pariwisata juga diharapkan mampu menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, lapangan pekerjaan baru, percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan kebijakan pengembangan pariwisata yang berdasarkan RIPPDA tahun 2010 sudah sangat baik, namun dalam implementasinya kita belum optimal sesuai dengan yang kita targetkan. Hal ini di karenakan kita masih kekurangan tenaga ahli dibidang pariwisata kemudian dalam pelaksanaan pengembangan Pariwisata di Natuna Alokasi anggaran yang di anggarkan belum mencukupi untuk melaksanakan program yang ada sehingga manfaatnya pun belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu kami dari Dinas Pariwisata berupaya untuk memaksimalkan dana yang ada dan tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan investor yang berminat menanamkan modal dibidang pariwisata”. (Wawancara 2012).

Dari perbedaan hasil pembahasan data kuesioner dan wawancara yang penulis dapatkan, disini penulis menganalisa bahwa ada indikasi kendala kendala yang dihadapi oleh Pelaksana Program dalam rangka peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur sehingga manfaat yang di harapkan dalam kenyataan tidak maksimal, hal ini tentunya menjadi koreksi semua pihak dalam kegiatan pengembangan atau peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur.

#### 4. Derajat perubahan yang dicapai

Pengembangan Aksesibilitas dan Infrastruktur daerah di maksudkan agar dapat memudahkan setiap wisatawan maupun bagi investor yang akan menanamkan modalnya ke Kabupaten Natuna sehingga dengan terbenahnya Aksesibilitas dan Infrastruktur para wisatawan mudah untuk mengunjungi setiap objek wisata yang ada, selain itu investorpun tidak berpikir panjang untuk menanamkan modalnya jika hal yang mendasar tersebut terpenuhi dengan baik.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap derajat perubahan yang diinginkan dalam kegiatan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.8**  
**Tanggapan Responden Terhadap Derajat Perubahan Yang**  
**Diinginkan Dalam Kegiatan Peningkatan Aksesibilitas Dan Infrastruktur**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	3	15%
2	Baik	4	20%
3	Cukup Baik	7	35%
4	Kurang Baik	6	30%
5	Tidak Baik	-	
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.8 diatas, tanggapan responden terhadap derajat perubahan yang diinginkan dalam kegiatan Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur dapat di kategorikan “Cukup Baik” yaitu 7 orang (35%) dari total responden. 3 orang (15%) Mengatakan Sangat Baik, 4 orang (20%) mengatakan Baik, sedangkan 6 (30%) orang mengatakan Kurang Baik.

Jadi, berdasarkan tabel 5.8 diatas, dapat dinyatakan bahwa derajat perubahan yang dicapai dalam kegiatan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur termasuk dalam kategori Cukup Baik.

Namun berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ada perbedaan yang penulis dapatkan yakni dalam kegiatan peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur derajat perubahan yang diinginkan untuk dicapai belum optimal, masih hanya beberapa target saja yang terpenuhi. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna Bapak Toni Yulifandri mengatakan :



“Untuk Perubahan yang diinginkan oleh Dinas Pariwisata sebenarnya sangat banyak, namun untuk implementasi dilapangan masih belum seoptimal yang kita inginkan hal ini terjadi karena beberapa faktor penghambat dalam kegiatan pengembangan Aksesibilitas dan Infrastruktur yakni faktor dana anggaran dari pemerintah yang sangat terbatas dan minimnya tenaga ahli di bidang pariwisata, sehingga belum kita belum mampu untuk berbuat banyak ”. (Wawancara 2012).

Dari perbedaan hasil pembahasan data kuesioner dan wawancara yang penulis dapatkan, disini penulis menganalisa bahwa ada indikasi kendala yang ditemui oleh pelaksana kegiatan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur sehingga derajat perubahan yang dicapai atau target tidak optimal. Hal tersebut dapat menjadi acuan kedepan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata untuk lebih mengoptimalkan anggaran yang ada demi tercapainya derajat perubahan yang diinginkan.

#### 5. Sumber Daya yang digunakan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, di Kabupaten Natuna banyak sekali terdapat Objek wisata yang dapat dijadikan objek kunjungan wisatawan yang datang ke Natuna untuk menikmati keindahan dan keaslian potensi objek wisata di Natuna. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai sumber daya yang digunakan dalam pengembangan Infrastruktur dan aksesibilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.9**  
**Tanggapan Responden Terhadap Sumber Daya Yang Digunakan**  
**Dalam Kegiatan Peningkatan Aksesibilitas Dan Infrastruktur**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	4	20%
2	Baik	4	20%
3	Cukup Baik	7	35%
4	Kurang Baik	5	25%
5	Tidak Baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.9 diatas, tanggapan responden mengenai sumber daya yang digunakan dalam kegiatan Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur dapat di kategorikan “Cukup Baik” yaitu 7 orang (35%) dari total responden. 4 orang (20%) Mengatakan Sangat Baik, 4 (20%) orang mengatakan Baik, sedangkan 5 (25%) orang mengatakan Kurang Baik.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan sesuai dengan jawaban responden yakni dalam kegiatan peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur mengenai sumber daya yang di gunakan cukup baik akan. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Tony Yulifandri selaku kepala bidang destinasi, beliau mengatakan :

“Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur kami dari pemerintah daerah berupaya memanfaatkan sumber daya dan memberdayakan masyarakat sekitar dari potensi yang ada di daerah kita ini, sehingga dengan kebijakan ini kita dapat mengenalkan potensi – potensi daerah kita kepada masyarakat dan juga wisatawan melalui kegiatan promosi dan pemasaran “. (wawancara 2012).

Jadi, berdasarkan tabel 5.9 diatas, dapat dinyatakan bahwa mengenai sumber daya yang digunakan dalam kegiatan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur termasuk dalam kategori Cukup Baik.

Dari perbedaan hasil pembahasan data kuesioner dan wawancara yang penulis dapatkan, disini penulis menganalisa bahwa ada indikasi kendala kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata sehingga sumber daya yang digunakan dalam kenyataan tidak maksimal, hal ini tentunya menjadi koreksi semua pihak dalam kegiatan pengembangan atau peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur.

Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya potensi pariwisata Natuna meliputi Pulau, pantai, terumbu arang, air terjun, batu-batuan dan lain sebagainya

sehingga dalam pengembangannya Pemerintah Daerah baru melakukan pengembangan kawasan yang menjadi prioritas yakni yang memiliki lokasi yang sangat strategis dan dekat dengan keramaian.

Dalam upaya peningkatan sumber daya pariwisata yang ada di Kabupaten Natuna, pemerintah berupaya memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh daerah yang memiliki nilai jual di bidang kepariwisataan sehingga nantinya mampu menjadi sumber pendapatan daerah.

Kemudian, untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden mengenai kebijakan pengembangan Aksesibilitas dan Infrastruktur dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.10**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai**  
**Kebijakan Pengembangan Aksesibilitas dan Infrastruktur**

No	Indikator Pengukuran	Klasifikasi Tanggapan Responden					
		SB	B	CB	KB	TB	Jumlah
1	Pelaksana Program	-	5 (25%)	8 (40%)	7 (35%)	-	20
2	Kepentingan yang Terpengaruhi	2(10%)	5 (25%)	7 (35%)	6 (30%)	-	20
3	Jenis manfaat yang dihasilkan	2(10%)	4 (20%)	8 (40%)	6 (30%)	-	20
4	Derajat perubahan yang dicapai	3(15%)	4 (20%)	7 (35%)	6 (30%)	-	20
5	Sumber daya yang digunakan	4(20%)	4 (20%)	7 (35%)	5 (25%)	-	20
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	-	<b>100</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>2,2</b>	<b>4,4</b>	<b>7,4</b>	<b>6</b>		<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>11%</b>	<b>22 %</b>	<b>37 %</b>	<b>30%</b>		<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator dalam kebijakan pengembangan Aksesibilitas dan Infrastruktur yang penulis ajukan kepada responden termasuk dalam kategori Kurang Baik, yaitu

rata-rata jawaban responden sebanyak 7,4 dengan persentase 37 % dari total 20 responden.

Berdasarkan rekapitulasi hasil tanggapan responden berdasarkan setiap indikator penelitian menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan aksesibilitas dapat dikategorikan Kurang baik, program yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Bidang Destinasi dapat di kategorikan dengan Kurang Baik yakni pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa wilayah objek wisata belum terpenuhi aksesibilitas dan infrastrukturnya sehingga ada beberapa objek wisata yang cukup sulit untuk dikunjungi oleh wisatawan. Hal ini dikarenakan kendala yakni dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah belum cukup, sehingga Dinas Pariwisata masih melakukan pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur di wilayah yang menjadi prioritas.

#### **b. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya dan Peningkatan Kelembagaan**

Pengembangan kegiatan kepariwisataan yang tidak tertata seringkali membawa konotasi negatif bagi perkembangan adat serta budaya setempat. Salah satu antisipasi dari hal tersebut dapat dilakukan dengan meletakkan dasar yang kokoh terhadap adat serta budaya setempat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan sejak dini nilai-nilai tradisi, budaya serta adat setempat melalui pendidikan formal, misalnya melalui kurikulum pendidikan. Sehingga pada masa yang akan datang nilai-nilai budaya tersebut tetap mengakar pada masyarakat dan dapat menjadi potensi budaya bagi pengembangan kegiatan kepariwisataan. Tujuan pengaturan dan kelembagaan pariwisata di Kabupaten Natuna adalah

meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan terwujudnya kemudahan berwisata di Kabupaten Natuna

Dalam konteks pariwisata sumber daya merupakan segala sesuatu yang memiliki potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata begitu juga dengan kelembagaan dalam hal ini Dinas Pariwisata juga mempunyai peran penting guna untuk mengarahkan kemajuan daerah khususnya dibidang kepariwisataan.

Peningkatan sumber daya dan kelembagaan oleh Dinas Pariwisata yang dilaksanakan juga oleh Bidang Destinasi yang mempunyai tugas dalam melakukan pembinaan terhadap tim satuan pengamanan, pembinaan SDM, dan pendidikan serta pelatihan bagi masyarakat maupun kelembagaan yakni dengan pembentukan kelompok sadar wisata yang berdasar kepada SK Bupati Natuna No 203 tahun 2010 tentang pembentukan kelompok sadar wisata teluk selahang.

Adapun indikator – indikator dari kegiatan pengembangan sumber daya dan peningkatan kelembagaan yaitu :

#### 1. Pelaksana Program

Untuk dapat menciptakan sumber daya manusia dan kelembagaan yang berkualitas dalam bidang kepariwisataan diperlukan keterlibatan pelaku pariwisata baik itu masyarakat, pengusaha pariwisata, pemerintah dalam hal ini di lakukan oleh setiap bidang yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksana program dalam pengembangan sumber daya dan kelembagaan dapat di lihat tabel berikut:

**Tabel 5.11**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana Program Pengembangan**  
**Sumber Daya Dan Kelembagaan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	-	-
2	Baik	4	20%
3	Cukup Baik	10	50%
4	Kurang Baik	6	30%
5	Tidak Baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.11 diatas, tanggapan responden terhadap pelaksana program pengembangan sumber daya dan kelembagaan dapat di kategorikan “Cukup Baik” yaitu 10 orang (50%) dari total responden. 4 orang (20%) responden mengatakan Baik, sedangkan 6 orang (30%) mengatakan Kurang Baik.

Jadi, berdasarkan tabel 5.11 diatas, dapat dinyatakan bahwa pelaksana program dalam kegiatan pengembangan sumber daya dan kelembagaan termasuk dalam kategori Cukup Baik.

Dalam pelaksanaan program pengembangan sumber daya dan kelembagaan ini yang menjadi pelaksana program ialah pemerintah dalam hal ini berperan menciptakan sebuah kebijakan yang dapat mengarahkan terbentuknya sumber daya dan kelembagaan yang handal dan juga sumber daya alam yang berdaya saing mampu menarik wisatawan. Kemudian strategi Pemerintah Kabupaten Natuna yang dijadikan dasar pembentukan sumberdaya pariwisata melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yakni melalui kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata yakni pelatihan Fotografi, Scuba Diving dan Snorkling, dan juga pembentukan kelompok Sadar wisata yang berada di Teluk Selahang yang berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut yang dibina oleh Dinas Pariwisata.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata dalam wawancara yang penulis lakukan yakni Ibu Nurbaiti, beliau mengatakan bahwa :

“Untuk kebijakan pengembangan sumberdaya dan kelembagaan, kita dari Dinas sudah membuat sebuah pelatihan bagi pegawai Dinas Pariwisata berupa pelatihan Fotografi, Scuba Diving dan Snorkling dan pembentukan kelompok Sadar wisata bagi masyarakat yang berada di wilayah objek wisata Teluk Selahang Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut dan juga kami selalu berupaya untuk memunculkan potensi – potensi sumber daya alam yang menarik”. (Wawancara 2012).

## 2. Kepentingan yang Terpengaruhi

Pengembangan sumber daya dan kelembagaan merupakan hal pokok dalam upaya pengembangan pariwisata daerah, Pengembangan sumber daya dan kelembagaan dimaksudkan untuk potensi yang mampu bersaing, baik dari penyediaan sumber daya alam yang mampu untuk dijual serta sumber daya manusia yang unggul dan memahami setiap kemampuan dan tugas dari masing – masing. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap Kepentingan yang Terpengaruhi dalam pengembangan sumber daya dan kelembagaan dapat di lihat tabel berikut:

**Tabel 5.12**  
**Tanggapan Responden Mengenai Kepentingan Yang Terpengaruhi**  
**dalam Pengembangan Sumber Daya Dan Kelembagaan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	2	10%
2	Baik	4	20%
3	Cukup Baik	8	40%
4	Kurang Baik	6	30%
5	Tidak Baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.12 diatas, tanggapan responden terhadap kepentingan yang terpengaruhi dalam pengembangan sumber daya dan kelembagaan dapat di

kategorikan “Cukup Baik” yaitu 8 orang (40%) dari total responden, 4 orang (20%) responden mengatakan Baik, 2 orang (10%) mengatakan Sangat Baik sedangkan 6 orang (30%) mengatakan Kurang Baik berdasarkan jawaban dari kuisioner yang penulis berikan.

Namun berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ada perbedaan yang penulis dapatkan yakni dalam kegiatan peningkatan sumber daya dan kelembagaan dalam hal kepentingan yang terpengaruhi belum sesuai hal ini penulis lihat dengan masih kurangnya tenaga-tenaga yang profesional yang tersedia pada Dinas Pariwisata, hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata Drs. Syamsul Hilal, beliau mengatakan

“ Kegiatan peningkatan sumber daya dan kelembagaan merupakan hal penting dalam memajukan Pariwisata daerah, karena dengan kegiatan tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan dibidang pariwisata yakni dengan tersedianya tenaga-tenaga yang profesional dibidang pariwisata, akan tetapi untuk kebijakan ini saya rasa belum optimal hal ini dapat dilihat dengan kurangnya kebutuhan akan tenaga – tenaga ahli. Mudah – mudahan kedepannya kami dari Dinas mampu memberikan pelatihan – pelatihan yang dibutuhkan”. (wawancara 2012).

Jadi, berdasarkan tabel 5.12 diatas, dapat dinyatakan bahwa kepentingan yang terpengaruhi dalam kegiatan pengembangan sumber daya dan kelembagaan termasuk dalam kategori Cukup Baik. Dengan pengembangan sumber daya dan kelembagaan berarti pemerintah telah berupaya dalam mempersiapkan potensi yang mampu bersaing didalam pengembangan pariwisata daerah.

### 3. Jenis manfaat yang dihasilkan

Dalam kegiatan pengembangan sumber daya dan kelembagaan, aspek ekonomi dari sumber daya alam mengandung nilai ekonomi yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat maupun pemerintah, sumber daya alam dipandang



sebagai hal yang sangat penting dalam kegiatan pengembangan pariwisata daerah yang memiliki nilai ekonomis apabila dikelola dengan baik. Akan tetapi sumberdaya manusia juga tidak kalah pentingnya demi kemajuan pariwisata disuatu daerah.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai manfaat yang dihasilkan dari peningkatan kelembagaan dan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.13**  
**Tanggapan Responden Mengenai Jenis Manfaat Yang Dihasilkan dalam Pengembangan Sumber Daya Dan Kelembagaan**

<b>No</b>	<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat Baik	1	5%
2	Baik	4	20%
3	Cukup Baik	9	45%
4	Kurang Baik	6	30%
5	Tidak Baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.13 diatas, tanggapan responden terhadap Jenis manfaat yang dihasilkan dalam pengembangan sumber daya dan kelembagaan dapat di kategorikan “Cukup Baik” yaitu 9 orang (45%) dari total responden, 4 orang (40%) responden mengatakan Baik, 1 orang (5%) mengatakan Sangat Baik, dan

Namun berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ada perbedaan yang penulis dapatkan yakni dalam kegiatan peningkatan sumber daya dan kelembagaan dalam hal jenis manfaat yang dihasilkan belum sesuai hal ini penulis lihat dengan masih kurangnya tenaga-tenaga yang profesional yang tersedia pada Dinas Pariwisata, hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Tony Yulifandri selaku Kepala Destinasi, beliau mengatakan :

“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kemajuan pariwisata, akan tetapi untuk kegiatan ini kita belum mendapatkan yang kita inginkan hal ini dapat dilihat dengan kurangnya tenaga – tenaga ahli yang kita butuhkan dan tentunya sangat mempengaruhi kemajuan pariwisata daerah Kabupaten Natuna, untuk itu kami selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan tersebut yakni dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan setiap tahunnya”. (wawancara 2012).

Jadi, berdasarkan tabel 5.13 diatas, dapat dinyatakan bahwa kepentingan yang terpengaruhi dalam kegiatan pengembangan sumber daya dan kelembagaan termasuk dalam kategori Cukup Baik. Namun berdasarkan Observasi dan wawancara yang penulis lakukan manfaat dari kegiatan peningkatan sumber daya dan kelembagaan belum optimal.

Peningkatan sumber daya dan kelembagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna cukup baik hal ini dapat dilihat pada dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan dengan upaya mempersiapkan masyarakat yang mampu bekerja dan peran aktif dalam suatu usaha, lembaga, organisasi yang bergerak dibidang pariwisata khususnya.

#### 4. Derajat perubahan yang dicapai

Pengembangan sumber daya dan kelembagaan diharapkan mampu memberikan perubahan yang telah menjadi target Pemerintah Daerah dan pengembangan pariwisata daerah. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai perubahan yang diinginkan dari peningkatan kelembagaan dan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.14**  
**Tanggapan Responden Mengenai Derajat Perubahan Yang Dicapai**  
**Dalam Pengembangan Sumber Daya Dan Kelembagaan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	2	10%
2	Baik	3	25%
3	Cukup Baik	8	40%
4	Kurang Baik	7	35%
5	Tidak Baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.14 diatas, tanggapan responden terhadap derajat perubahan yang dicapai dalam pengembangan sumber daya dan kelembagaan dapat di kategorikan “Cukup Baik” yaitu 8 orang (40%) dari total responden, 2 orang (10%) mengatakan Sangat Baik dan 3 orang (25%) mengatakan sangat baik, sedangkan 7 orang (35%) mengatakan Kurang Baik.

Jadi, berdasarkan tabel 5.14 diatas, dapat dinyatakan bahwa derajat perubahan yang dicapai dalam kegiatan pengembangan sumber daya dan kelembagaan dikategorikan Cukup Baik.

Pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Natuna dalam upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana tatacara berorganisasi dan berlembagaan dapat dikatakan cukup baik, sehingga lembaga dan organisasi yang bergerak dibidang pariwisata yang didirikan oleh masyarakat Natuna bisa menjadi partner kerja Pemerintah Daerah.

#### 5. Sumber daya yang digunakan

Untuk kebijakan pengembangan sumber daya terdapat 3 arah pengembangan sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya

budaya. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai sumber daya yang digunakan dapat kita lihat tabel berikut:

**Tabel 5.15**  
**Tanggapan Responden Mengenai Sumber daya yang digunakan dalam Pengembangan Sumber Daya Dan Kelembagaan**

<b>No</b>	<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat Baik	2	10%
2	Baik	5	25%
3	Cukup Baik	9	45%
4	Kurang Baik	4	20%
5	Tidak Baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.15 diatas, tanggapan responden terhadap sumber daya yang digunakan dalam pengembangan sumber daya dan kelembagaan dapat di kategorikan “Cukup Baik” yaitu 9 orang (45%) dari total responden, 2 orang (10%) mengatakan Sangat Baik, 5 orang (25%) mengatakan Baik, sedangkan 4 orang (20%) mengatakan Kurang Baik.

Jadi, berdasarkan tabel 5.15 diatas, dapat dinyatakan bahwa Sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pengembangan sumber daya dan kelembagaan dikategorikan Cukup Baik.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan yakni dalam kegiatan peningkatan sumber daya dan kelembagaan dalam hal sumber daya yang digunakan cukup baik akan tetapi masih perlu peningkatan sumber daya baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusia serta kelembagaan. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata bapak Drs. Syamsul Hilal, beliau mengatakan :

“Untuk kebijakan ini Pemerintah Daerah Natuna telah berupaya memanfaatkan sumber daya yang ada berupa sumber daya alam yang meliputi segala kekayaan alam berupa keindahan dan keunikan alam, keragaman flora, keragaman fauna, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya manusia merupakan komponen yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata dan sumber daya budaya memiliki peran yang sangat penting yang menyebabkan orang lain ingin berkunjung untuk melihat perbedaan cara hidup dan budaya dan memahami dan mempelajari budaya disuatu tempat”. (wawancara 2012).

Kemudian, untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden mengenai Kebijakan Pengembangan Sumber Daya dan Peningkatan Kelembagaan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.16**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai**  
**Kebijakan Pengembangan Sumber Daya dan Peningkatan Kelembagaan**

No	Indikator Pengukuran	Klasifikasi Tanggapan Responden					
		SB	B	CB	KB	TB	Jumlah
1	Pelaksana Program		4(20%)	10 (50%)	6 (30%)		20
2	Kepentingan yang Terpengaruhi	2(10%)	4(20%)	8(40%)	6 (30%)		20
3	Jenis manfaat yang dihasilkan	1 (5%)	4(20%)	9 (45%)	6 (30%)		20
4	Derajat perubahan yang dicapai	2 (10%)	3(15%)	8(40%)	7 (35%)		20
5	Sumber daya yang digunakan	2 (10%)	5(25%)	9 (45%)	4 (20%)		20
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>29</b>		<b>100</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>1,4</b>	<b>4</b>	<b>8,8</b>	<b>5,8</b>		<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>7%</b>	<b>20%</b>	<b>44%</b>	<b>29%</b>		<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator dalam kebijakan pengembangan kebijakan pengembangan sumber daya dan peningkatan kelembagaan yang penulis ajukan kepada responden termasuk

dalam kategori Kurang Baik, yaitu rata-rata jawaban responden sebanyak 8,8 dengan persentase 44% dari total 20 responden.

Dari kebijakan pengembangan sumber daya dan kelembagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sebenarnya pemerintah telah melakukan upaya pengembangan tersebut karena sumber daya dan kelembagaan merupakan faktor penting dalam kemajuan pariwisata. Namun pada pelaksanaannya Pemerintah menemui beberapa kendala yang menghambat pengembangan tersebut berupa : kurangnya apresiasi para *stakeholder* terhadap kegiatan wisata yang dapat dilakukan, faktor SDM yang masih terbatas.

#### **c. Kebijakan Pengembangan Pemasaran dan Promosi.**

Dalam upaya pengembangan kepariwisataan, fungsi pemasaran pariwisata menjadi amat penting karena dalam rangka memupuk keuntungan demi pengembangan usahanya dan memberi kepuasan kepada pelanggan, terkandung upaya produsen menyesuaikan produk dengan keinginan dan kebutuhan konsumen/wisatawan. Pemasaran pariwisata dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai tolak ukur keberhasilan.

Kebijakan pengembangan pemasaran dan promosi yang dilaksanakan oleh Bidang Pemasaran dan juga seksi Dokumentasi dengan kegiatan yang dilakukan meliputi melakukan kerja sama dan koordinasi, menyelenggarakan event – event pemasaran wisata, mengadakan pameran yang di bantu oleh seksi analisa pasar, sarana promosi, dan kerjasama pariwisata. Untuk kegiatan ini pemerintah daerah telah berupaya melakukan kegiatan pemasaran dan promosi

kepada wisatawan dengan pemasangan iklan di media, menggelar event pariwisata dan mengikuti kegiatan parade tari dan juga kesenian gasing.

#### 1. Pelaksana Program

Kebijakan pengembangan pemasaran merupakan hal yang terpenting dalam pengembangan kepariwisataan daerah karena pemasaran dan promosi merupakan hal utama dalam memberikan informasi kepada wisatawan dan juga merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berusaha mempengaruhi orang lain dalam hal ini wisatawan baik lokal maupun asing untuk datang berkunjung ke Natuna. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pelaksana program dalam kegiatan pengembangan pemasaran dan promosi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.17**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana Program Dalam Kegiatan Pemasaran Dan Promosi**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	1	5%
2	Baik	4	20%
3	Cukup Baik	9	45%
4	Kurang Baik	6	30%
5	Tidak Baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.17 diatas, tanggapan responden terhadap pelaksana program dalam pengembangan pemasaran dan promosi dapat di kategorikan “Cukup Baik” yaitu 9 orang (45%) dari total 20 responden, 4 orang (20%) mengatakan baik, 6 orang (30%) mengatakan Kurang Baik dan 1 (10%) orang mengatakan sangat baik.

Jadi, berdasarkan tabel 5.17 diatas, dapat dinyatakan bahwa pelaksana program pengembangan pemasaran dan promosi dalam kegiatan pengembangan dikategorikan Cukup Baik.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, penulis melihat kegiatan Promosi dan Pemasaran yang dilakukan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Hal senada dikatakan oleh Kepala Bidang Pemasara dan Promosi bapak Drs. Marhafiz Luthfi M.Si mengatakan :

“Promosi merupakan salah satu upaya pengenalan produk wisata yang ada didaerah kepada khalayak ramai dengan memberikan informasi dan pengetahuan, dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata melakukan upaya peningkatan pemasaran dan promosi dengan baik, dengan bekerja sama dengan Media Massa, penerbit, dan organisasi yang bergerak dibidang pariwisata”. (wawancara 2012).

## 2. Kepentingan yang Terpengaruhi

Kegiatan promosi dan pemasaran memiliki peran yang penting dalam pengembangan pariwisata daerah. Dalam hal ini tentunya berupa pendapatan bagi daerah. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kepentingan yang terpengaruhi dari kebijakan pemasaran dan promosi dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.18**  
**Tanggapan Responden Mengenai Kepentingan Yang Terpengaruhi Dari Kegiatan Pemasaran Dan Promosi**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	1	5%
2	Baik	2	10%
3	Cukup Baik	13	65%
4	Kurang Baik	4	20%
5	Tidak Baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012



Dari tabel 5.18 diatas, tanggapan responden terhadap kepentingan yang terpengaruhi dalam pengembangan pemasaran dan promosi dapat di kategorikan “Cukup Baik” yaitu 13 orang (65%) dari total 20 responden, 1 orang (5%) mengatakan Sangat Baik, 2 (10%) orang mengatakan Baik, dan 4 orang (20%) mengatakan Kurang Baik.

Jadi, berdasarkan tabel 5.18 diatas, dapat dinyatakan bahwa kepentingan yang terpengaruhi dari pengembangan pemasaran dan promosi dalam kegiatan pengembangan dikategorikan Cukup Baik. Hal senada juga di sampaikan oleh pengusaha pariwisata Bapak Harmain Usman ditemui peneliti dikediaman beliau di Ranai Darat mengatakan bahwa:

“Kebijakan pemasaran dan promosi yang dilakukan pemerintah daerah sangat terasa manfaatnya bagi kami sebagai pengusaha pariwisata, sejak dilaksanakannya kebijakan tersebut tempat wisata yang saya miliki juga mengalami peningkatan pengunjung yang sangat menguntungkan bagi kami pengusaha. Yang biasanya sebelum ada promosi dan pemasaran pengunjung tidak seramai sekarang, jadi menurut saya kebijakan tersebut sangat membantu kami”. (wawancara 2012)

### 3. Jenis manfaat yang dihasilkan

Sektor pariwisata merupakan kombinasi produk wisata dan aktivitas yang berbeda – beda. Oleh karena itu sektor pariwisata juga memiliki resiko ketidakpastian. Kehidupan jangka panjang pariwisata daerah tergantung seberapa baik pengelolaan dan pemasaran pariwisata daerah. Apabila dikelola secara baik dan benar maka pariwisata daerah akan maju akan tetapi jika tidak baik dan benar dalam pengelolaan maka yang terjadi malah sebaliknya. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai manfaat yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan pemasaran dan promosi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.19**  
**Tanggapan Responden Mengenai Manfaat Yang Dihasilkan Dari Kegiatan Pemasaran Dan Promosi**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	2	10%
2	Baik	4	20%
3	Cukup Baik	10	50%
4	Kurang Baik	4	20%
5	Tidak Baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.19 diatas, tanggapan responden terhadap dalam pengembangan pemasaran dan promosi dapat di kategorikan “Cukup Baik” yaitu 10 orang (50%) dari total 20 responden, 4 orang (20%) mengatakan Baik, 2 (10%) orang mengatakan sangat baik, dan 4 orang mengatakan Kurang Baik.

Jadi, berdasarkan tabel 5.19 diatas, dapat dinyatakan bahwa manfaat yang dihasilkan dari pengembangan pemasaran dan promosi dalam kegiatan pengembangan dikategorikan Cukup Baik.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di beberapa objek wisata, penulis sependapat dengan jawaban responden penulis melihat manfaat dari kegiatan pemasaran ini dikatakan Cukup baik, hal senada juga di ungkapkan oleh Ibu Fatimah selaku pengusaha Rumah Makan di Pantai Teluk Selahang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya kegiatan promosi yang dilakukan oleh PEMDA kami sebagai pengusaha Rumah Makan disini sangat merasakan manfaatnya, *Alhamdulillah* dengan adanya promosi kami mendapatkan keuntungan yang lumayan dan makin hari pengunjung semakin banyak apalagi pada hari libur”. (wawancara 2012).

Promosi dan pemasaran pariwisata dilakukan agar potensi yang ada di Kabupaten Natuna dapat diketahui oleh wisatawan baik lokal maupun asing sehingga mereka datang dan berkunjung untuk menikmati potensi yang ada,

adapun manfaat yang dihasilkan dari kebijakan tersebut cukup baik hal ini dapat dilihat dari bertambahnya pengunjung disetiap objek wisata salah satunya Pantai Teluk Selahang atau yang dikenal dengan Pantai Tanjung.

#### 4. Derajat perubahan yang dicapai

Pemerintah membuat kebijakan karena menginginkan bahwa ada perubahan dari pariwisata daerah, perubahan yang dimaksud ialah pariwisata mampu menjadi sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai derajat perubahan yang dicapai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.20**  
**Tanggapan Responden Mengenai Derajat Perubahan Yang Dicapai Dari Kegiatan Pemasaran Dan Promosi**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	2	10%
2	Baik	2	10%
3	Cukup Baik	12	60%
4	Kurang Baik	4	20%
5	Tidak Baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.20 diatas, tanggapan responden terhadap dalam pengembangan pemasaran dan promosi dapat di kategorikan “Cukup Baik” yaitu 12 orang (60%) dari total 20 responden. Sedangkan 2 orang (10%) mengatakan Sangat Baik, 2 orang (10%) mengatakan Baik, dan 4 orang (20%) mengatakan Kurang Baik.

Jadi, berdasarkan tabel 5.20 diatas, dapat dinyatakan bahwa derajat perubahan yang dicapai dari pengembangan pemasaran dan promosi dalam kegiatan pengembangan dikategorikan Cukup Baik. Hal senada juga disampaikan

oleh Kabid Pemasaran dan Promosi Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna

Bapak Marhafiz Lutfi beliau mengatakan bahwa:

“Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna telah melakukan upaya promosi dan pemasaran kepada masyarakat luas agar berminat berkunjung ke natuna, kegiatan promosi dan pemasaran ini kami lakukan pada setiap mengikuti perlombaan tarian tingkat nasional di Jakarta, kemudian pada pertandingan gasing di Jakarta dan Tanjung Pinang, pembuatan situs pariwisata Natuna di internet, brosur, pamflet, dan kaset cd yang berisikan informasi tentang profil pariwisata Natuna dengan 3 versi bahasa yakni bahasa Indonesia, Inggris, dan Jepang.” (wawancara 2012)

#### 5. Sumber daya yang digunakan

Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan komunikasi untuk meningkatkan kualitas serta citra pariwisata daerah. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pemasaran dan promosi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.21**  
**Tanggapan Responden Mengenai Sumber Daya yang digunakan dalam Kegiatan Pemasaran Dan Promosi**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	2	10%
2	Baik	3	15%
3	Cukup Baik	10	50%
4	Kurang Baik	5	25%
5	Tidak Baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.21 diatas, tanggapan responden terhadap sumber daya yang digunakan dalam pengembangan pemasaran dan promosi dapat di kategorikan “Cukup Baik” yaitu 20 orang (50%) dari total responden. Sedangkan 3 orang (15%) mengatakan Baik, 2 (20%) orang mengatakan sangat baik dan 5 Orang (25%) mengatakan Kurang Baik.

Jadi, berdasarkan tabel 5.21 diatas, dapat dinyatakan bahwa sumber daya yang digunakan dari pengembangan pemasaran dan promosi dalam kegiatan pengembangan dikategorikan cukup Baik.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan penulis sependapat dengan jawaban responden bahwa sumber daya yang digunakan cukup baik. Hal senada juga diucapkan oleh Kabid Pemasaran dan Promosi Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna Bapak Marhafiz Lutfi beliau mengatakan bahwa:

“Pengembangan Pemasaran dan Promosi pariwisata daerah Kabupaten Natuna dilakukan dengan cara pemasangan iklan dalam media cetak, media elektronik, pemasangan iklan di ruang terbuka, pengadaan sarana pendukung pemasaran berupa majalah, poster, stiker, dan melalui informasi rekaman gambar dan suara baik kaset maupun internet”. (wawancara 2012).

Untuk kebijakan pemasaran ini Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna telah memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cukup baik yakni dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah Kabupaten Natuna.

Kemudian, untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden mengenai Kebijakan Pemasaran dan Promosi dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.22**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai**  
**Kebijakan Pemasaran dan Promosi**

No	Indikator Pengukuran	Klasifikasi Tanggapan Responden					Jumlah
		SB	B	CB	KB	TB	
1	Pelaksana Program	1(5%)	4(20%)	9(45%)	6 (30%)		20
2	Kepentingan yang Terpengaruhi	1(5%)	2(10%)	13 (65%)	4 (20%)		20
3	Jenis manfaat yang dihasilkan	2(10%)	4(20%)	10 (50%)	4 (20%)		20
4	Derajat perubahan yang dicapai	2(10%)	2(10%)	12 (60%)	4 (20%)		20
5	Sumber daya yang digunakan	2(10%)	3(15%)	10 (50%)	5 (25%)		20
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>15</b>	<b>54</b>	<b>23</b>		<b>100</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>1,6</b>	<b>3</b>	<b>10,8</b>	<b>4,6</b>		<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>8%</b>	<b>15%</b>	<b>54%</b>	<b>23%</b>		<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator dalam kebijakan pengembangan kebijakan Pemasaran dan Promosi yang penulis ajukan kepada responden termasuk dalam kategori Cukup Baik, yaitu rata-rata jawaban responden sebanyak 5,4 dengan persentase 54 % dari total 20 responden. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Pariwisata dalam hal ini telah melakukan kegiatan pengembangan pemasaran dan promosi dengan cukup baik meskipun belum optimal.

#### **d. Kebijakan Pengembangan Produk Wisata**

Pada umumnya wisatawan mempunyai pengetahuan atau informasi yang kurang memadai mengenai tempat wisata. Pemahaman wisatawan terhadap suatu tempat, dalam hal ini adalah destinasi wisata sangat dipengaruhi oleh citra atau *image* yang ditampilkan dalam berbagai produk wisatanya. Sangatlah penting untuk menampilkan produk wisata Kabupaten Natuna yang mampu

menggambarkan keunikan karakter suatu destinasi wisata yang bermakna dan mempunyai signifikansi yang tinggi dengan konteks lingkungannya, baik secara alami maupun kultural. Keunikan karakter ini direpresentasikan dalam kondisi geografis, bentang alam, sejarah, kebudayaan, *heritage*/warisan pusaka, tradisi, gaya hidup, kepercayaan, perayaan/event, masyarakat, tempat dan seni budaya.

#### 1. Pelaksana Program

Pengembangan produk wisata perlu memperhatikan standar-standar mutu produk dan pelayanan dasar seperti kebersihan, sanitasi dan higienis, keaslian dan kehandalan serta keamanan. Pengembangan produk wisata dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan masyarakat, kemampuan pemerintah daerah serta keuletan pelaku usaha dalam melihat dan mengolah potensi wisata menjadi produk - produk yang bermanfaat. Artinya pengembangan produk wisata dilakukan tidak dengan cara masal dan dengan perubahan yang drastis, tetapi dapat dengan seksama dan bertahap. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pelaksana program dalam pengembangan produk wisata dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.23**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana Program Dalam Pengembangan Produk Wisata**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	2	10%
2	Baik	4	20%
3	Cukup Baik	8	40%
4	Kurang Baik	6	30%
5	Tidak Baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.23 diatas, tanggapan responden terhadap pelaksana program dalam pengembangan produk wisata dapat di kategorikan “Cukup Baik” yaitu 8 orang (40%) dari total responden. Sedangkan 4 orang (20%) mengatakan Baik, 2 orang (10%) mengatakan Sangat Baik dan 6 orang (30%) mengatakan Kurang Baik.

Jadi, berdasarkan tabel 5.23 diatas, dapat dinyatakan bahwa pelaksana program dari pengembangan produk wisata dikategorikan cukup Baik.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan penulis tidak menemukan perbedaan akan tetapi penulis mengharapkan adanya usaha – usaha yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk memberdayakan pengusaha – pengusaha karena pengusaha juga merupakan komponen dalam kemajuan pariwisata. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Bapak Drs. Syamsul Hilal mengatakan :

“Dalam kegiatan pengembangan produk wisata ini Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pariwisata melaksanakan kegiatan pengembangan produk pariwisata didukung oleh industri kecil dan menengah yang berbasis pada perekonomian rakyat hal ini penting karena kegiatan wisata diharapkan juga memacu peningkatan ekonomi rakyat, menyerap tenaga kerja dan memperkuat pemberdayaan masyarakat”. (wawancara 2012).

Oleh karena itu program - program pengembangan produk wisata seyogyanya melibatkan peran serta usaha kecil dan koperasi serta mengembangkan kemitraan dengan usaha menengah dan investor lokal. Namun pada kenyataannya dilapangan masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata yakni sulit untuk mengumpulkan pengusaha – pengusaha pariwisata dan juga masyarakat.



## 2. Kepentingan yang terpengaruhi

Kebijakan pengembangan produk wisata diharapkan memberikan pengaruh mengangkat prospek pengembangan wisata yang belum berkembang untuk dapat berkembang menjadi wisata unggulan. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kepentingan yang terpengaruhi dari kebijakan pengembangan produk wisata dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.24**  
**Tanggapan Responden Mengenai Kepentingan Yang Terpengaruhi**  
**Dalam Pengembangan Produk Wisata**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	2	10%
2	Baik	3	15%
3	Cukup Baik	11	55%
4	Kurang Baik	4	20%
5	Tidak Baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.24 diatas, tanggapan responden terhadap kepentingan yang terpengaruhi dalam pengembangan produk wisata dapat di kategorikan “Cukup Baik” yaitu 11 orang (55%) dari total responden. Sedangkan 3 orang (15%) mengatakan Baik dan 2 (10%) orang mengatakan sangat baik dan 4 orang (20%) mengatakan Kurang Baik.

Jadi, berdasarkan tabel 5.24 diatas, dapat dinyatakan bahwa kepentingan yang terpengaruhi dalam pengembangan produk wisata dalam kegiatan pengembangan dikategorikan cukup Baik.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan penulis menemukan perbedaan dengan jawaban responden dengan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengusaha pariwisata Bapak Harmain Usman beliau mengatakan:

“Pemerintah Daerah belum melakukan pengembangan produk wisata secara baik, hal ini dapat kita lihat dengan produk – produk wisata yang pemerintah kembangkan baru wisata bahari seperti laut, terumbu karang, dan lain – lain padahal potensi yang lain di daerah kita ini sangat baik. Jika pemerintah mau mengembangkan produk wisata yang lain tentunya tidak kalah menarik dengan wisata bahari. Pemerintah masih belum berani untuk mengembangkan potensi yang lain dan terkesan belum serius. Untuk itu saya pribadi sebagai pengusaha pariwisata mengharapkan pemerintah agar mengembangkan semua potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga pendapatan daerah dengan adanya kunjungan – kunjungan wisatawan”. (wawancara 2012).

Pengembangan produk pariwisata Kabupaten Natuna dilakukan sesuai dengan kondisi dan potensi pariwisata yang dimiliki, untuk saat ini pemerintah belum dapat dikatakan melakukan kegiatan pengembangan produk wisata secara menyeluruh dan pengaruhnya dapat dikatakan belum optimal.

### 3. Jenis manfaat yang dihasilkan

Daerah Kabupaten Natuna Memiliki potensi pariwisata yang sangat banyak dan perlu sekali bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengembangan dari produk wisata Natuna. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai manfaat yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan produk wisata dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.25**  
**Tanggapan Responden Mengenai Manfaat Yang Di Hasilkan**  
**Dalam Pengembangan Produk Wisata**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	2	10%
2	Baik	3	15%
3	Cukup Baik	12	60%
4	Kurang Baik	3	15%
5	Tidak Baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.25 diatas, tanggapan responden terhadap manfaat yang dihasilkan dalam pengembangan produk wisata dapat di kategorikan “Cukup Baik” yaitu 12 orang (60%) dari total responden. Sedangkan 3 orang (15%) mengatakan baik, 2 (10%) orang mengatakan sangat baik dan 3 orang (15%) mengatakan Kurang Baik

Jadi, berdasarkan tabel 5.25 diatas, dapat dinyatakan bahwa manfaat yang dihasilkan dalam pengembangan produk wisata dalam kegiatan pengembangan dikategorikan cukup Baik.

Namun berdasarkan observasi yang penulis lakukan ada indikasi bahwa manfaat yang di inginkan dalam kegiatan pengembangan produk wisata di Kabupaten Natuna belum optimal sehingga manfaatnya belum nampak jelas bagi wisatawan dan juga masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna Bapak Syamsul Hilal dalam wawancara yang penulis lakukan beliau mengatakan bahwa:

“Kabupaten Natuna merupakan wilayah yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata. Selama ini permasalahan yang terdapat dalam pengembangan wisata Kabupaten Natuna adalah belum optimalnya pengembangan produk wisata yang dilihat dari belum memadainya sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan wisata, kurangnya apresiasi para *stakeholder* terhadap kegiatan wisata yang dapat dilakukan, faktor SDM yang masih terbatas, serta kurangnya ketersediaan transportasi dan aksesibilitas. Oleh karena pengembangan produk wisata hendaknya direncanakan secara tepat dalam arti disesuaikan dengan karakteristik dan komponen sumber daya maupun daya dukungnya”. (Wawancara 2012).

#### 4. Derajat perubahan yang dicapai

Pemerintah membuat kebijakan karena menginginkan ada perubahan dari pariwisata daerah, perubahan yang dimaksud ialah terwujudnya produk wisata unggulan Natuna yang mampu bersaing dengan objek wisata yang ada di daerah lain sehingga pariwisata daerah mampu memikat para wisatawan untuk

berkunjung. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai derajat perubahan yang dicapai dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.26**  
**Tanggapan Responden Mengenai Derajat Perubahan Yang Dicapai**  
**Dalam Pengembangan Produk Wisata**

<b>No</b>	<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat Baik	3	15%
2	Baik	4	20%
3	Cukup Baik	8	40%
4	Kurang Baik	5	25%
5	Tidak Baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.26 diatas, tanggapan responden terhadap manfaat yang dihasilkan dalam pengembangan produk wisata dapat di kategorikan “Cukup Baik” yaitu 8 orang (40%) dari total responden. Sedangkan 4 orang (20%) mengatakan Baik, 3 (15%) orang mengatakan sangat baik dan 5 orang (25%) mengatakan Kurang Baik.

Jadi, berdasarkan tabel 5.26 diatas, dapat dinyatakan bahwa derajat perubahan yang dihasilkan dalam pengembangan produk wisata dalam kegiatan pengembangan dikategorikan cukup Baik.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan penulis menemukan perbedaan akan tetapi penulis mengharapkan adanya usaha – usaha yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk melakukan kegiatan pengembangan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Dinas Pariwisata Ibu Nurbaiti mengatakan :

“Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna melakukan kegiatan pengembangan produk wisata ini mengharapkan suatu perubahan bagi pariwisata Natuna salah satunya dibidang produk wisatanya karena banyak potensi pariwisata Natuna yang belum terbenahi dengan baik sehingga dapat menjadi wisata unggulan, dalam hal ini pemerintah telah mengupayakan melakukan pengembangan yang nantinya di harapkan mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan”. (wawancara 2012).

#### 5. Sumber daya yang digunakan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, di Kabupaten Natuna banyak sekali terdapat Objek wisata yang dapat dijadikan wisata unggulan tentunya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Natuna yang memerlukan pengembangan. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pengembangan produk wisata dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.27**  
**Tanggapan Responden Mengenai Sumber Daya Yang Digunakan**  
**Dalam Pengembangan Produk Wisata**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	1	5%
2	Baik	3	15%
3	Cukup Baik	13	65%
4	Kurang Baik	3	15%
5	Tidak Baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.27 diatas, tanggapan responden terhadap sumber daya yang digunakan dalam pengembangan produk wisata dapat di kategorikan “Cukup Baik” yaitu 13 orang (65%) dari total responden. Sedangkan 3 orang (15%) mengatakan baik dan 1 (10%) orang mengatakan sangat baik, dan 3 orang (15%) mengatakan Kurang Baik.

Jadi, berdasarkan tabel 5.27 diatas, dapat dinyatakan bahwa sumber daya yang digunakan dalam pengembangan produk wisata dalam kegiatan pengembangan dikategorikan cukup baik.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, penulis mendapatkan sedikit perbedaan dengan jawaban responden yakni penulis melihat bahwa masih sangat sedikit sekali sumber daya yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan menjadi koreksi bagi pemerintah. Hal senada juga diucapkan oleh pengusaha pariwisata Bapak Kadarman mengatakan :

“Untuk kegiatan ini yang bapak lihat Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, padahal jika kita melihat potensi pariwisata Natuna tentunya Pemerintah Daerah seharusnya mampu berbuat lebih banyak untuk kemajuan pariwisata Natuna ”. (wawancara 2012).

Kemudian, untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden mengenai Kebijakan pengembangan produk wisata dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.28**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai**  
**Kebijakan Pengembangan Produk Wisata**

No	Indikator Pengukuran	Klasifikasi Tanggapan Responden					Jumlah
		SB	B	CB	KB	TB	
1	Pelaksana Program	2 (10%)	4(20%)	8(40%)	6 (30%)		20
2	Kepentingan yang Terpengaruhi	2(10%)	3(15%)	11 (55%)	4 (20%)		20
3	Jenis manfaat yang dihasilkan	2(10%)	3(15%)	12 (60%)	3 (15%)		20
4	Derajat perubahan yang dicapai	3(15%)	4(20%)	8 (40%)	5 (25%)		20
5	Sumber daya yang digunakan	1 (15%)	3(15%)	13 (65%)	3 (15%)		20
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>17</b>	<b>52</b>	<b>21</b>		<b>100</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>2</b>	<b>3,4</b>	<b>10,4</b>	<b>4,2</b>		<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>10%</b>	<b>17%</b>	<b>52%</b>	<b>21%</b>		<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator dalam Kebijakan pengembangan produk wisata yang penulis ajukan kepada responden termasuk dalam kategori Cukup Baik, yaitu rata-rata jawaban responden sebanyak 10,4 dengan persentase 52 % dari total 20 responden.

Kemudian untuk melihat rekapitulasi jumlah rata-rata tanggapan responden tentang Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna berdasarkan indikator-indikatornya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.29**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Implementasi**  
**Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna**

<b>No</b>	<b>Indikator Variabel</b>	<b>Klasifikasi Jumlah Rata-rata Tanggapan Responden</b>					
		<b>SB</b>	<b>B</b>	<b>CB</b>	<b>KB</b>	<b>TB</b>	<b>Jumlah</b>
1	Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Pariwisata	<b>2,2 (11%)</b>	<b>4,4 (22%)</b>	<b>7,4 (37%)</b>	<b>6 (30%)</b>	-	<b>20</b>
2	Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan.	<b>1,4 (7 %)</b>	<b>4 (20 %)</b>	<b>8,8 (44%)</b>	<b>5,8 (29%)</b>	-	<b>20</b>
3	Pemasaran dan Promosi	<b>1,6 (8%)</b>	<b>3 (15%)</b>	<b>10,8 (54%)</b>	<b>4,6 (23%)</b>	-	<b>20</b>
4	Pengembangan Produk Wisata	<b>2 (10% )</b>	<b>3,4 (17%)</b>	<b>10,4 (52 %)</b>	<b>4,2 (21%)</b>	-	<b>20</b>
<b>Jumlah</b>		<b>7,2</b>	<b>14,8</b>	<b>37,4</b>	<b>20,6</b>		<b>80</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>1,8</b>	<b>3,7</b>	<b>9,35</b>	<b>5,15</b>		<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>9%</b>	<b>18%</b>	<b>46,75%</b>	<b>25,75%</b>		<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi diatas terlihat bahwa jumlah rata-rata tanggapan responden yang menyatakan Kurang Baik yaitu 9,35 atau dengan persentase 46,75%, kemudian jumlah rata-rata tanggapan responden yang menyatakan baik yaitu 3,7 dengan persentase 18%, sedangkan jumlah rata-rata tanggapan

responden yang menyatakan sangat baik yaitu 1,8 dengan persentase 9 % dan jumlah rata – rata tanggapan responden yang menyatakan Kurang Baik yaitu 5,15 dengan persentase 25,75%.

Dari penjelasan diatas dapat di ketahui bahwa secara keseluruhan indikator variabel yang penulis ajukan kepada responden mengenai Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, termasuk dalam kategori Kurang Baik yaitu 9,35 atau dengan persentase 46,75%.

Setelah melihat dari implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan objek wisata yang dilakukan berupa:

- a) Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Pariwisata
- b) Pengembangan Sumber Daya dan Peningkatan Kelembagaan.
- c) Pemasaran dan Promosi.
- d) Pengembangan Produk Wisata

Berjalan Kurang Baik tidak seperti yang di targetkan oleh Pemerintah Daerah, hal ini dapat dilihat pada hasil kuesioner yang penulis sebarakan kepada responden, dimana mereka merasa belum puas dengan kebijakan dan implementasi yang dibuat dan laksanakan oleh Pemerintah Daerah. Mereka mengharapkan agar kedepannya pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pengembangan pariwisata daerah, karena dengan kemajuan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan melalui tabel – tabel tanggapan responden maka dapat diperoleh dan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata daerah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pariwisata menyusun dan melaksanakan kebijakan pengembangan. Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut :
  - a. Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Pariwisata  
Pengembangan infrastruktur dimaksudkan untuk memberi fasilitas dan kenyamanan bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Natuna. Peningkatan infrastruktur ini meliputi pembangunan tempat – tempat wisata, akses transportasi telekomunikasi yang memberikan kemudahan yang mendukung wisatawan.
  - b. Pengembangan Sumber Daya dan Peningkatan Kelembagaan.  
Sumber daya merupakan atribut alam yang bersifat netral sampai ada campur tangan manusia dari luar untuk mengubahnya agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia itu. Dalam konteks pariwisata, sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu

yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mampu menguasai di bidangnya. Kebijakan kelembagaan di ambil daerah guna membentuk kerja sama antara lembaga maupun organisasi yang bergerak dalam bidang pengembangan dan pengelolaan objek wisata sehingga mempunyai kesamaan visi dan misi guna menyukkseskan pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Natuna.

a. Pemasaran dan Promosi.

Kebijakan pemasaran dan promosi merupakan hal yang pertama dan utama dalam upaya peningkatan pendapatan (penjualan), karena dengan melalui promosi dan pemasaran inilah pemerintah daerah memberikan informasi kepada wisatawan tentang objek wisata yang ada di Kabupaten Natuna.

b. Pengembangan Produk Wisata

Kebijakan pengembangan produk wisata diharapkan mampu menjadikan potensi yang ada menjadi potensi unggulan dan juga dapat mengangkat prospek pengembangan bagi wisata yang belum dikembangkan.

2. Kebijakan pengembangan objek wisata daerah Kabupaten Natuna yang meliputi berbagai komponen pariwisata tersebut Kurang Baik, yakni dalam implementasi dilapangan masih menemui beberapa kendala dan harus dibenahi dengan baik agar tujuan dari kebijakan pengembangan

kepariwisataan yang terdapat dalam RIPPDA terwujud. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata sebagai stakeholder pelaksana kebijakan harus dapat melakukan usaha – usaha guna meningkatkan pengembangan objek wisata. Namun pada kenyataannya dinas pariwisata masih bertumpu pada beberapa objek wisata sehingga potensi lain kurang perhatian. hal ini dikarenakan minimnya anggaran dari Pemerintah Daerah, faktor sumber daya manusia yang tidak ahli dibidang pariwisata dan faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pariwisata. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pariwisata daerah Kabupaten Natuna yakni dengan menambahkan anggaran guna melaksanakan kebijakan pengembangan, karena selama ini yang menjadi kendala ialah keterbatasan dana. Kemudian dengan mengembangkan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan dan menjalin kerja sama dengan pihak lain, mengembangkan potensi – potensi sumber daya alam yang ada, dan memberikan informasi dan bersosialisasi kepada masyarakat tentang sadar wisata.

## **6.2 Saran**

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai pertimbangan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna demi tercapainya tujuan Pengembangan objek wisata agar efektif, yakni :

1. Dinas Pariwisata mengajukan permohonan penambahan anggaran, melibatkan mitra kerja, mempersiapkan tenaga – tenaga ahli yang berkompeten dibidang pariwisata dan berusaha mendatangkan investor sehingga kebijakan pengembangan objek wisata daerah dapat berjalan dengan baik.
2. Pemerintah Kabupaten Natuna hendaknya membina kelompok sadar wisata yang telah dibentuk yang akan membantu pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan objek – objek wisata, membuat perencanaan yang matang pada setiap objek wisata, mengadakan pembinaan kepada masyarakat yang bertempat tinggal pada wilayah objek wisata, menggali dan mengembangkan potensi lain daerah Kabupaten Natuna.
3. Pemerintah Kabupaten Natuna hendaknya memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana pariwisata, meningkatkan kualitas pengelolaan, meningkatkan keprofesionalan kerja dan memantapkan kelembagaan dan meningkatkan kerja sama demi kelancaran dan pengembangan kepariwisataan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S, *Manajemen Penelitian*: Rineka Cipta. Jakarta. 1990
- Dunn, William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*: CV. Alfabeta, Bandung. 2004.
- I Gede Pitana, dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*: CV. Andi Offset. Yogyakarta. 2006
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*: Bina Aksara. Jakarta. 1992
- Nugroho, Riant D, *Kebijakan Publik “ Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*: PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. 2004
- Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*: CV. Alfabeta. Bandung. 2010
- Riduwan. *Dasar-dasar Statistika*: CV. Alfabeta. Bandung. 2008
- Singarimbun. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta. 2001
- Suwantoro, Gamal. *Dasar – Dasar Pariwisata*, Andi Offset. Yogyakarta. 2004
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan*: PT. Bumi Aksara. Jakarta. 2005
- Syafiie, I, *Ilmu Administrasi Publik*: Rineka Cipta. Jakarta. 1999
- Sukandarmadi, *Metodologi Penelitian*: Gajah Mada University Press, 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*: CV. Alfabeta. Bandung. 2007
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Administrasi*: CV. Alfabeta. Bandung. 2010
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*: CV. Alfabeta, Bandung 2008.
- Natuna Regency, *Mutiara Dijuang Utara*, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Natuna. 2007
- Buku Panduan Pariwisata Natuna, Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. 2010
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.67/UM.001/MKP/2004 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau – pulau Kecil.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 tahun 2011, Tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2010.

Renstra Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna 2011

Undang – undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004